



**Orasi Pengukuhan Profesor Riset
Bidang Sosial Ekonomi Pertanian**

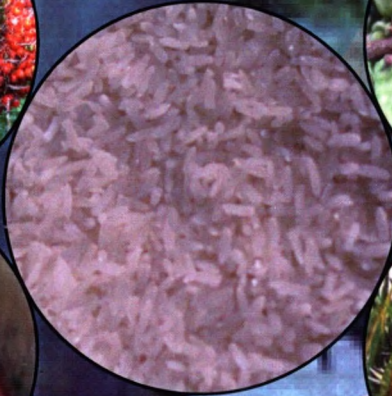
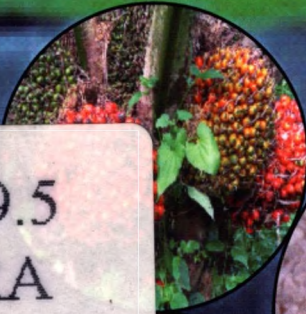


KEBANGKITAN PERTANIAN NASIONAL : MERETAS JEBAKAN GLOBALISASI DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN

Oleh :

Dr. Ir. Hutabarat Budiman Franchen

39.5
FRA
k



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
BOGOR JANUARI 2009**

339.5
FRA
tc

ISBN 978-979-8191-60-2



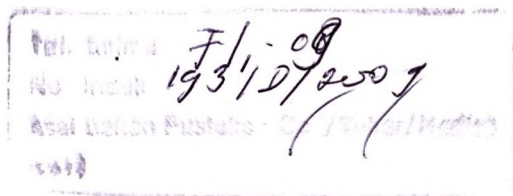
**Orasi Pengukuhan Profesor Riset
Bidang Sosial Ekonomi Pertanian**



KEBANGKITAN PERTANIAN NASIONAL: MERETAS JEBAKAN GLOBALISASI DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN

Oleh:

Dr. Ir. Hutabarat Budiman Franchen



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
BOGOR, JANUARI 2009**

© Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2008

ISBN 978-979-8191-60-2
Katalog dalam Terbitan (KDT)

Kebangkitan Pertanian Nasional: Meretas Jebakan Globalisasi
dan Liberalisasi Perdagangan/Hutabarat Budiman Franchen
ii+71 hlm; 14,5 x 20,2 cm

ISBN 978-979-8191-60-2

1. Pertanian 2. Perdagangan 3. Globalisasi 4. Liberalisasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jln. Ragunan 29 Pasarminggu, Jakarta Selatan
Telp. : 021-7806202
Faks. : 021-7800644
E-mail : kabadan@litbang.deptan.go.id

PRAKATA PENGUKUHAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan para hadirin sekalian yang saya muliakan,

Pertama sekali saya patut menyampaikan puji dan syukur kepada TUHAN Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas berkat dan karuniaNya yang tidak ternilai dilimpahkan kepada kita semua terutama saya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara orasi pengukuhan Profesor Riset Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan orasi pengukuhan dengan memilih judul:

KEBANGKITAN PERTANIAN NASIONAL: MERETAS JEBAKAN GLOBALISASI DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN

Isi orasi ini terdiri dari 6 Bab sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Perubahan Sistem Perdagangan Internasional dan Implikasinya
- III. Dinamika Perdagangan Produk dan Sektor Pertanian Indonesia
- IV. Strategi Mengatasi Jebakan Globalisasi dan Liberalisasi Pertanian
- V. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan
- VI. Penutup

I. PENDAHULUAN

Sidang majelis dan hadirin yang saya muliakan,

Abad ke-21 diperkirakan menjadi abad perubahan perekonomian global, sebagai akibat perubahan ekonomi industri abad ke-20 menjadi ekonomi informasi dan pengetahuan, yang akan mengubah jati diri perekonomian lokal, nasional dan internasional, sosial, budaya, dan politik. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan perubahan kebijakan pasar. Kebijakan dan campur tangan pemerintah yang sangat kuat di sebagian besar negara pada banyak industri dan pasar, melemah dan digantikan kekuatan globalisasi, liberalisasi, dan deregulasi. Namun, kekuatan-kekuatan ini telah mengukuhkan peran pasar dalam pengalokasian sumber daya, produksi, penjualan barang dan jasa dalam skala global. Akankah semuanya ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia?

Globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah di berbagai negara, digerakkan oleh perdagangan dan investasi internasional, dan mobilitas tenaga kerja yang dibantu oleh teknologi dan jasa informasi dan komunikasi. Liberalisasi di bidang ekonomi diartikan sebagai pengurangan aturan, larangan atau pembatasan wewenang pemerintah di bidang ekonomi untuk mendorong kelancaran arus barang pertanian dari petani ke konsumen. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum diharapkan akan makin meningkat. Gerakan liberalisasi berjalan secara multilateral, regional, bilateral atau bahkan unilateral melalui perundingan.

Perubahan ini memberi ketidakpastian dan arah pengembangan ke depan yang makin sulit bagi sektor pertanian nasional dan bahkan berpotensi menjebak sektor ini di masa depan. Karena itu timbul

pertanyaan, siapa di antara kelompok warga negara dan kelompok negara yang mendapat manfaat paling besar dari sistem globalisasi dan liberalisasi? Pertanyaan ini penting artinya mengingat teknologi informasi dan pengetahuan yang didukung oleh aturan globalisasi dan liberalisasi atau aturan globalisasi dan liberalisasi yang memacu pengembangan teknologi informasi, komunikasi dan pengetahuan, diproduksi dan dikuasai negara maju. Sementara masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia masih terbatas sebagai pasar dan pengguna potensial produk teknologi dan pengetahuan serta aturan-aturan yang dihasilkan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menguraikan dinamika globalisasi dan liberalisasi di bidang pertanian, melalui mekanisme perdagangan internasional yang mengalami banyak perubahan dan menganalisis pengaruh dan potensi jebakannya pada sektor pertanian nasional. Dalam orasi ini juga dikemukakan beberapa gagasan untuk menghadapi tantangan tersebut.

II. PERUBAHAN SISTEM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA

2.1. Keunggulan Komparatif dan Analisis Dampak Tarif dan Kuota Impor

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya muliakan,

Kebijakan perdagangan bebas atau liberalisasi sebagai tonggak perundingan perdagangan multilateral sejak GATT (sekarang Organisasi Perdagangan Dunia/OPD (*World Trade Organization/ WTO*)) berakar dari teori keunggulan komparatif (Ricardo 1821) dan analisis dampak tarif dan kuota impor. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang apabila biaya yang dibutuhkan lebih

kecil daripada negara lain. Dengan demikian, perdagangan antara dua negara akan menguntungkan karena setiap negara dimungkinkan mengkhususkan diri pada produksi barang tertentu secara efisien.

Teori analisis dampak tarif dan kuota impor menyatakan bahwa pengenaan tarif pada suatu produk, misalnya produk pertanian, menyebabkan harga produk naik di dalam negeri. Petani memperoleh rangsangan untuk meningkatkan produksi, sementara konsumen berusaha mengurangi konsumsi dan pemerintah memperoleh pendapatan dari pengenaan tarif. Namun, masyarakat secara umum dirugikan karena kerugian konsumen jauh melebihi keuntungan yang diperoleh petani dan tambahan penerimaan bagi pemerintah. Apabila tarif ini dihapus dan perdagangan bebas diberlakukan, maka masyarakat secara keseluruhan akan mendapat manfaat positif.

Dua pendekatan di atas dideduksi dari teori ekonomi neoklasik yang merupakan sintesis dari teori ekonomi persaingan bebas klasik (*homoeconomicus* dan *invisible hand*), ajaran kepuasan marjinal dan keseimbangan umum. Dengan memperkenalkan pengertian “tangan tersembunyi” atau *invisible hand*, Smith (1776) meyakini pasar mampu mengkoordinasikan perilaku dan tindakan banyak orang yang memproduksi barang yang berbeda. Mekanisme pasar bersaing bebas, dengan berbagai andaian, selalu menuju keseimbangan dan keefisienan optimal yang baik bagi semua unsur yang terlibat (*pareto optimal*). Dengan kata lain, jika pasar dibiarkan bebas dan tidak diganggu oleh aturan-aturan pemerintah yang bertujuan baik sekali pun, masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan optimal bersama (Mubyarto 2002).

Secara implisit, sistem ekonomi pasar yang melandasi teori keunggulan komparatif diandaikan bersaing sempurna, yakni setiap

pelaku ekonomi mempunyai akses informasi yang sama. Teori ini juga didasarkan pada andaian bahwa modal tidak berpindah, tetap ditanam di dalam negeri, dan pasar akan mengatur dirinya sendiri.

Anjuran kebijakan dan desakan ke arah globalisasi dan liberalisasi dalam 30-40 tahun terakhir di seluruh dunia didasarkan pada pengkhususan produksi mengikuti teori keunggulan komparatif. Perundingan multilateral yang difasilitasi oleh OPD dan resep kebijakan lembaga publik internasional seperti Bank Dunia/BD (*World Bank/WB*) serta Dana Moneter Internasional/DMI (*International Monetary Fund/IMF*) bertumpu pada liberalisasi melalui tiga kebijakan pokok, yaitu keterbukaan terhadap perdagangan internasional, kemantapan ekonomi makro, dan pembatasan campur tangan pemerintah dalam ekonomi (Williamson 2002).

2.2. Pandangan Kritis terhadap Andaian-andaian Teori Keunggulan Komparatif

Teori ekonomi arus utama dan teori keunggulan komparatif yang melandasi teori perdagangan bebas saat ini telah digugat oleh banyak ahli, antara lain Ormerod (2001), Keen (2001), dan Nelson (2001). Selain secara terbuka mengenalkan berbagai andaian yang sangat sederhana, teori tersebut secara terselubung juga menyimpan berbagai andaian yang sangat ketat. Keduanya memiliki kelemahan. Persaingan sempurna yang menjadi andaian dasar tidak ditemui di dunia nyata perdagangan domestik dan internasional. Bentuk yang umum ditemui adalah persaingan tidak sempurna seperti monopoli, monopolistik, oligopoli, dan oligopolistik (Hutabarat dkk. 1989, Hutabarat dkk. 1993, Hutabarat dan Yusdja 1995, Hutabarat dan Rahmanto 2004). Harga dan jumlah produk yang diperdagangkan

tidak sama dengan apa yang diramalkan pasar bersaing sempurna, seperti dibuktikan oleh kasus *intra-industry trade*, yakni barang yang sama dapat diperdagangkan antar-dua negara.

Andaian pemilikan akses informasi pasar yang sama oleh pelaku ekonomi tidak ditemui dalam kenyataan (Stiglitz 2002). Ini dapat menimbulkan ketidakpastian usahatani dan harga (Hutabarat 1987, 2006). Petani bahkan sering tidak mempedulikan aba-aba pasar. Mereka berproduksi untuk tujuan keamanan pangan dan kesesuaian tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik serta tradisi. Petani padi, misalnya, selalu menanam padi selama pengairan tersedia. Bahkan ketidak-sempurnaan informasi pasar dapat mendorong petani untuk menganekaragamkan tanaman usahatani (Rachmat dan Hutabarat 1988, Rachmat dkk 1988, Marisa dan Hutabarat 1988, Sayaka dan Hutabarat 1996). Selain itu, pelaku pasar/usaha tidak benar mewarisi nafsu persaingan dan keserakahan semata. Niat Berjasama yang adil juga ada dan melekat dengan sifat kebakaan manusia itu sendiri (Hahnel 2002).

Andaian teori keunggulan komparatif tentang biaya tandingan tenaga kerja tetap, bertentangan dengan kenyataan yang ada, yakni makin banyak suatu barang diproduksi, makin banyak pula barang lain yang harus dikorbankan atau tidak diproduksi.

Andaian modal yang tidak berpindah dan tetap diinvestasikan di dalam negeri juga keliru. Sejak Smith dan Ricardo menulis sekitar 200 tahun lalu, banyak perubahan yang telah terjadi di dunia. Kini modal bukan lagi sebagai faktor produksi tetap, tetapi sudah menjadi faktor produksi yang mudah berpindah. Bagi negara yang tidak memiliki atau telah mengalami kelangkaan sumber daya alam, teori keunggulan komparatif menjadi kurang relevan. Faktor yang lebih

diutamakan perusahaan untuk berinvestasi masa kini adalah pasar tujuan, tenaga kerja, dan iklim investasi. Dengan andaian ini teori juga menjadi tidak konsisten, yakni faktor produksi (modal atau tenaga kerja) yang diandaikan tidak berpindah, tetapi digunakan sebagai pendukung kebijakan untuk meliberalisasi atau membuat tapal batas suatu negara agar makin mudah ditembus oleh modal dan barang dari luar.

Aspek yang juga diabaikan oleh teori keunggulan komparatif adalah biaya perdagangan, misalnya akses ke transportasi, jarak ke pasar ekspor, biaya administrasi, dan eksternalitas negatifnya. Padahal faktor-faktor ini makin mahal dan dapat menghambat arus perdagangan di masa depan.

Teori keunggulan komparatif juga ditentang oleh Porter (*dalam* Tarmidi dan Basri 1997) yang membuktikan bahwa keunggulan komparatif tidak terletak di tingkat nasional, tetapi di tingkat industri atau bagian industri tertentu. Meskipun secara finansial dan ekonomi usaha pertanian menguntungkan dan memiliki keunggulan komparatif, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan impor komoditas pertanian tetap berjalan dan investasi pada usahatani komoditas tersebut tidak berkembang (Hutabarat dkk. 1990, 1992, 1997, 1998; Hutabarat dan Agustian 1998).

Teori ekonomi mikro dasar juga menunjukkan bahwa persaingan sempurna dalam suatu industri dengan penerimaan yang meningkat bersifat tidak mantap. Kemantapan perkembangan industri hanya terjadi pada pasar persaingan tidak sempurna seperti oligopoli. Tinjauan Krugman (1987) serta Antweiler dan Trefler (2002) atas teori perdagangan yang baru, menunjukkan bahwa *pertama*, hasil akhir *laissez-faire* tidak optimal lagi digunakan dan *kedua*, penolakan atas

campur tangan pemerintah tidak didukung oleh landasan teori yang kuat. Menurut Daly dan Cobb (1989), teori ekonomi neoklasik cenderung menyamakan manfaat kegiatan ekonomi dengan peningkatan barang dan jasa yang diterima anggota masyarakat, tidak menyentuh perubahan mutu hubungan yang menjalin masyarakat tersebut. Akibatnya, kekuatan ekonomi yang terpusat di tingkat global, yang dijunjung perdagangan bebas, sementara kekuatan politik tersebar di tingkat nasional dan lokal, sangat mengekang peran dan rentang kendali yang diperlukan pemerintah menghadapi masalah di luar pasar.

Pengkhurusan produksi suatu barang juga membuat suatu negara menjadi sangat bergantung pada kegiatan perdagangan. Ini mengabaikan dimensi komunitas dalam menyejahterakan masyarakat (Daly 1994). Karena itu, adu tawar negara yang tidak waspada menjaga keswasembadaan kebutuhan pokoknya akan menjadi rapuh. Ini akan berpengaruh pada kesempatan kerja warga, padahal kesejahteraan sebagian warga masyarakat ditentukan oleh cara mereka memperoleh pendapatan dan membelanjakan pendapatan itu sendiri.

Dalam menganalisis kinerja ekonomi sepanjang waktu, teori neoklasik juga memilih dua andaian yang salah. *Pertama*, kelembagaan tidak penting. *Kedua*, waktu tidak penting (North 1993). Kelembagaan itu penting untuk membangun struktur rangsangan masyarakat, dan kelembagaan politik dan ekonomi yang dihasilkan masyarakat adalah penentu utama kinerja ekonomi. Dimensi waktu juga penting karena berkaitan dengan perubahan sosial-ekonomi di mana manusia belajar membentuk, mengubah, dan mengembangkan kelembagaannya. Keengganan teori ekonomi neoklasik memasukkan faktor budaya dan keadilan dalam model analisis juga dicatat oleh

Aziz (1997) dan Mubyarto (2002). Sistem ekonomi yang lestari dan dapat berkembang, memerlukan modal sosial dan budaya yang cukup kuat sebagai pendukung, selain modal uang dan keterampilan manajemen (Sumardjan 2002).

2.3. Dampak Liberalisasi Perdagangan Dunia dan Kawasan

Majelis Pengukuhan dan hadirin yang dimuliakan,

Pengaruh liberalisasi perdagangan telah menjadi kajian empiris yang sangat menarik akhir-akhir ini, berupa analisis setelah peristiwa terjadi (*ex-post*) dan prakiraan (*ex-ante*) yang bersifat agregat atau kelompok wilayah dan benua. Di Indonesia, kajian dilakukan antara lain oleh Erwidodo dan Feridhanisetyawan (1997), Achterbosch *et al.* (2004), Hutabarat dkk. (2004, 2005, 2006, 2007, 2008), Purba dkk. (2007). Secara umum, kesimpulan dari kajian tersebut adalah keterbukaan pasar melalui pengurangan hambatan perdagangan secara bersama di seluruh negara, akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia. Namun, beberapa anggota atau kelompok masyarakat tertentu menderita kerugian, karena peningkatan harga di dalam negeri.

Di tingkat agregat global, analisis pengaruh liberalisasi bagi negara berkembang memberikan hasil yang bertolak belakang. Satu pihak menyatakan liberalisasi dan globalisasi meningkatkan kesejahteraan negara berkembang, pihak lain menyatakan sebaliknya. Dollar dan Kraay (2002, 2004) berpandangan bahwa kaum miskin di negara berkembang mendapatkan manfaat berarti dari liberalisasi dan globalisasi perdagangan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan. Ia juga berpengaruh kecil pada

kesenjangan pendapatan. Ravalion (2001) dan Milanovic (2004) berpesan bahwa volume perdagangan yang makin besar mempersempit kesenjangan di antara negara yang berpendapatan tinggi.

Sebelum Konferensi Tingkat Menteri/KTM ke-V di Cancun pada September 2003, banyak pihak mengutip hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa negara berkembang akan memperoleh manfaat yang lebih besar kalau liberalisasi dilakukan di pasar domestik mereka, daripada liberalisasi di negara-negara kaya (World Bank 2002). Namun, kajian-kajian terbaru, termasuk yang dilakukan Bank Dunia, memberikan informasi yang bertolakbelakang (Cline 2004, World Bank 2005, Anderson *et al.* 2005). Cline (2004) menyatakan, perdagangan bebas ternyata hanya memberi manfaat ekonomi jangka panjang sebesar 200 milyar dolar AS setiap tahun bagi negara berkembang.

Model Carnegie (Polaski 2006) mendapat hasil yang berbeda pula, di mana ia memprakirakan manfaat perundingan perdagangan dalam Putaran Doha mungkin kecil. Sebagian besar negara berkembang mendapat manfaat dari liberalisasi manufaktur, sementara liberalisasi pertanian akan mempunyai pengaruh yang berbeda. Argentina, Brazil, dan sebagian negara ASEAN mendapat manfaat peningkatan pendapatan dari liberalisasi pertanian, sementara Cina, India, dan banyak negara di Afrika menderita kerugian. Model ini juga menemukan bahwa secara umum pendapatan di negara dan kawasan termiskin di dunia mengalami penurunan dalam berbagai skenario liberalisasi. Struktur produksi pertanian skala kecil berproduktivitas rendah di banyak negara miskin menyebabkan petani mudah terpengaruh oleh produk impor yang lebih murah, sementara peningkatan ekspor yang

dijanjikan liberalisasi tidak banyak berarti. Bank Pembangunan Asia (2007) dalam laporannya menyebutkan globalisasi akan memperlebar kesenjangan pendapatan di hampir seluruh negara di Asia.

2.4. Dinamika Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dan Dampaknya bagi Pertanian Indonesia

Jauh sebelum Organisasi Perdagangan Dunia/OPD terbentuk, Indonesia telah menjadi sebuah *"GATT contracting party"* pada 24 Februari 1950, atau empat setengah tahun setelah merdeka dan menjadi anggota OPD sejak 1995. Mukadimah OPD 1994 merupakan pengembangan mukadimah GATT 1947, yang berbunyi sebagai berikut:

"... relations (of contracting parties) in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to (1) raising standards of living, (2) ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and (3) expanding the production of and trade in good and services..." (WTO 1999).

Sejalan dengan mukadimah OPD, mukadimah Perjanjian Pertanian/PP (*Agreement on Agriculture/AoA*) dirumuskan sebagai berikut:

"... to establish a fair and market-oriented agricultural trading system..." (WTO 1999).

Jelas bahwa OPD dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan para anggota melalui sistem perdagangan pertanian yang adil dan

berorientasi pasar yang dirancang melalui perundingan. Namun, proses perundingan sampai saat ini makin menyimpang dari sasaran yang tersirat dan tersurat dari mukadimah tersebut, seperti terlihat dari beberapa persetujuan yang disepakati dan cara berlangsungnya perundingan di forum OPD. Aturan-aturan yang ada saat ini lebih propasar (bersaing sempurna) dan mendesak para anggota tidak hanya meliberalisasi perdagangan barang, tetapi juga membatasi negara anggota untuk tidak menetapkan kebijakan yang tidak ramah pasar di bidang jasa, penanaman modal, dan kekayaan intelektual. Kekhawatiran ini sebenarnya telah terlihat dalam perjalanan OPD selama lima tahun pertama yang ditandai dengan kegagalan perundingan di Seattle pada tahun 1999, terutama karena perbedaan harapan antara negara berkembang dan negara maju atas keberadaan organisasi tersebut.

Masalah itu dicoba dijembatani perundingan tahun 2001 di Doha, tetapi sampai kini perbedaan itu tetap ada. Bahkan beberapa negara berpendapat Putaran Doha tidak berbeda dengan Putaran Uruguay, yakni memperketat kewajiban yang sudah ada dan memperluas disiplin perdagangan multilateral baru ke bidang politik yang masih dan seharusnya menjadi wilayah domestik. Kegagalan perundingan di Cancun agaknya juga belum cukup sebagai pengalaman negara maju agar lebih sungguh-sungguh mempertimbangkan dampak buruk gerakan liberalisasi perdagangan di negara berkembang yang dilayangkan oleh perjanjian multilateral yang ada saat ini. Hal ini dapat dilihat mulai dari Putaran Uruguay, Pertemuan di Singapura Desember 1996, Perundingan Cancun yang membuka jalan untuk produk pertanian negara berkembang agar mendapatkan Perlakuan Khusus dan Berbeda/PKB (*Special and Differential Treatment/SDT*) September 2003, Pertemuan Dewan Umum di Jenewa Juli 2004,

dan Perundingan Hongkong Desember 2005. Sementara itu, pada Sidang Khusus Komisi Pertanian pada tahun 2007, Ketua membuat rancangan modalitas baru untuk semua isu pertanian, yang cenderung selalu mencari kesejajaran antara fasilitas yang akan diterima negara berkembang dengan apa yang didapat negara maju, antara lain *Special Product/SP* dengan *Sensitive Product*, *Special Safeguard Mechanism/SSM* dengan *Special Safeguard*.

PKB untuk negara berkembang sangat minim dan seakan cukup dinyatakan melalui rumus **angka ajaib** semata: sekitar **50-67% dari perlakuan apa pun yang menyangkut waktu (besaran tarif) yang dialami negara maju** (Hutabarat 2007b). Padahal pendapatan per kapita, jumlah petani, dan tingkat kemajuan ekonomi di negara berkembang tidaklah 50% lebih rendah atau 67% lebih lambat daripada di negara maju. Wajarlah apabila negara berkembang mendapatkan PKB yang lebih luas di sektor pertanian, karena ia masih menjadi motor penggerak pembangunan mereka. Ini membutuhkan teknologi dan inovasi teknologi bukanlah fenomena pasar (Nicholson 1988).

2.5. Reinkarnasi Perusahaan Swasta Besar ala VOC: Akankah Sejarah Berulang Kembali?

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mempercepat gerakan globalisasi seperti saat ini, meskipun sifat-sifat gelombangnya sama dengan yang terjadi sebelum Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, kecuali dari segi jangkauan, kecepatan, kemudahan, dan kedalamannya (Friedman 2000). Semua ini telah mendorong tumbuh-suburnya perusahaan lintas negara yang bersifat monopoli dan terpadu secara vertikal.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kekuatan pasar di bidang produksi, pengolahan, dan penyebaran produk pertanian dan aturan perdagangan dan penanaman modal global saling mempengaruhi (Murphy 2006). Dari kinerja OPD terlihat bahwa Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa adalah pemain yang paling berpengaruh saat ini (Sullivan *et al.* 2003). Ternyata, perusahaan lintas negara atau perusahaan multibangsa memiliki akses langsung kepada ketiga kekuatan ini, khususnya melalui kelompok-kelompok lobi perusahaan yang berpengaruh. Perusahaan besar ini tumbuh subur di bawah sistem perdagangan bebas, sementara petani di negara berkembang bahkan di beberapa negara maju makin tersisih. Hal ini dimungkinkan oleh wewenang OPD yang baru di sektor pertanian dan investasi, hak kekayaan intelektual, sehingga jalan bagi korporasi global dalam penguasaan benih, pangan, usahatani, dan keragaman bio makin lebar (Barker and Mander 1999). Sebagai contoh, di Amerika Serikat beberapa perusahaan agribisnis lintas negara menguasai semua produksi, angkutan, dan pengolahan komoditas pertanian (Murphy 2002, Ritchie *et al.* 2003). Di tingkat eceran, penyebaran dan penjualan produk pangan terpusat pada rantai tata niaga perusahaan yang sangat besar, tetapi dalam jumlah sedikit. Kroger, Albertsons, Wal-Mart, Safeway, dan Ahold menguasai sekitar 40% penjualan pangan eceran di Amerika Serikat (Cohrane 2000).

Di Asia Tenggara, perusahaan multibangsa telah lama berjalan dan akan tetap berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Sebagian bahkan telah menganekaragamkan bisnis mereka ke bidang lain. Keikutsertaan perusahaan multibangsa diperlukan untuk mendorong prakarsa setempat, perbaikan kinerja usahatani, dan kesejahteraan penduduk yang terlibat dalam agribisnis dengan menjaga keseimbangan perolehan pangsa harga untuk

semua pihak (Hutabarat 2005). Namun, dalam prakteknya, pangsa ini sulit ditetapkan dan walaupun dapat, mekanisme pengawasannya berat. Harga yang diterima petani kopi yang sangat rendah adalah satu ciri rantai pemasaran kopi di Indonesia yang belum efisien. Faktanya, perusahaan yang menguasai pasar kopi biji dan atau pasar ecerannya adalah perusahaan multibangsa yang jumlahnya sedikit (Hutabarat dkk. 2003, Hutabarat 2004).

Hal senada terlihat pada perdagangan benih jagung (Sayaka 2006) dan industri pakan di Indonesia pada tahun 1990an. Industri berpadu secara horizontal dan spasial menjadi pabrik skala besar (Hutabarat dkk. 1993, Hutabarat dan Yusdja 1995). Industri pakan juga mengalami proses perpaduan vertikal, yakni beberapa pabrik pakan masuk ke industri hilirnya, yaitu usaha-usaha produksi peternakan seperti bibit ayam, ayam petelur, dan ayam pedaging. Demikian pula produk ekspor pertanian primer. Saat ini, jurus baru pemasaran “mekanisme rantai pasok atau nilai “ (*supply or value chain management*) adalah hasil rancangan perusahaan kuat. Mekanisme ini akan menempatkan penghasil produk primer di simpul terbawah rantai pasok dengan imbalan usaha rendah.

III. DINAMIKA PERDAGANGAN PRODUK DAN SEKTOR PERTANIAN INDONESIA

3.1. Monopoli Perdagangan Pertanian di Era Pra-Milenia

Hadirin yang saya muliakan,

Perdagangan komoditas pertanian Indonesia telah terjadi jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan, melalui pedagang dari Cina, India, dan Arab (Reid 1984). Pada abad ke-14, komoditas bernilai tinggi seperti lada dan cengkeh yang ada di bumi nusantara

mengundang perhatian pedagang Eropa datang ke Asia Tenggara, kemudian mengembangkan tanaman perdagangan seperti kopi dan tembakau (Booth 1992). Pada abad ke-17 dan 18, perdagangan di seluruh kepulauan dikuasai oleh pedagang Eropa, terutama Belanda dengan perusahaannya bernama VOC, melalui kekuatan monopoli dan monopsoninya dalam perdagangan produk pertanian di pasar internasional. Pajak dan devisa komoditas pertanian digunakan untuk mengisi kas pemerintah atau menutup defisit anggaran (Mubyarto 2002, Mackie 1992) dan menjadi sarana pembangunan pemerintah kolonial. Untuk memantapkan penerimaan ini, pemerintah kolonial memperluas areal pertanian, memperkenalkan dan mengembangkan beberapa komoditas baru seperti tebu dan karet di Jawa dan Sumatera Utara, bahkan secara paksa (*cultuurstelsel*) dan hasilnya diekspor ke pasar internasional. Sehingga, ekonomi Indonesia terpadu secara sempurna dalam perdagangan internasional.

Sistem ini dapat melipatgandakan ekspor komoditas pertanian, tetapi ekonomi pertanian tradisional tidak berkembang, karena kelangkaan investasi (van der Eng 1993). Di sisi lain, “tanam paksa” memberikan pengalaman bercocok tanam bagi petani, tetapi produksi mereka diserahkan kepada perusahaan pemerintah kolonial. Perkebunan komoditas ekspor makin berkembang, seperti cengkeh di Maluku; lada di Bangka, Belitung, dan Lampung; kayu manis di Sumatera Barat; vanili di Bali dan Lampung; tembakau dan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur; kakao di Sulawesi Selatan dan Tenggara; karet di Sumatera dan Kalimantan; dan kopra di Sulawesi Utara.

Pada akhir tahun 1930an perkebunan rakyat mendominasi produksi kopi, kopra, rempah-rempah, dan karet (Booth 1992). Melewati masa penjajahan dan menjelang era pembangunan ekonomi, kelompok produk ekspor bernilai tinggi beralih ke kelompok produk

minyak bumi, mineral, dan kayu. Namun, kelompok ini lebih banyak memberikan penerimaan bagi negara daripada membuka lapangan kerja, sementara ekspor hasil pertanian tradisional seperti karet dan kopra memberikan penerimaan tidak merata atau bergejolak, padahal kedua komoditas ini penting dalam membuka kesempatan kerja dan pendapatan (Dapice 1987).

3.2. Penurunan Sumbangan dan Perolehan Devisa Perdagangan Pertanian di Era Milenia

Saat ini peranan pertanian dalam perekonomian nasional makin surut, seperti ditunjukkan oleh sumbangannya terhadap PDB nasional dari 15,6% pada tahun 2001 menjadi 14,5% pada tahun 2005. Dalam perolehan devisa, sumbangannya juga sangat rendah terhadap nilai ekspor barang total nasional dan makin menurun sejak OPD terbentuk, dari 9,0% pada periode 1987-1992 menjadi 7,8% pada periode 1995-2000. Sementara itu pengeluaran devisa untuk impor produk pertanian pada periode yang sama makin meningkat. Dalam periode 1987-1992, nilai impor pertanian hanya 8,7% dari nilai impor barang total nasional. Angka ini meningkat menjadi 13,4% dalam periode 1995-2000 (Hutabarat 2007).

Namun, ada dua catatan penting yang dapat disimpulkan. *Pertama*, perdagangan ekspor produk pertanian Indonesia pada hakikatnya bergejolak, tidak sama untuk setiap produk, tetapi keunggulan produk pertanian selalu dapat muncul kembali karena sifatnya yang dapat terbarukan. *Kedua*, pengendalian devisa ekspor dari produk-produk yang berasal dari bahan baku tambang atau bahan mentah akan membawa Indonesia pada kerawanan karena sumber daya ini tidak dapat terbarukan dan cenderung mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak mau bekerja keras dan tidak inovatif. Ini seharusnya juga menjadi pendorong agar pengembangan pertanian mendapat perhatian yang lebih besar.

Enam kelompok (2-digit HS) produk pertanian ekspor Indonesia yang memberi sumbangan paling menonjol adalah kopi, teh, rempah-rempah, lemak dan minyak hewani dan nabati, sayuran yang dapat dimakan, tembakau, coklat dan olahan sayuran di mana nilai eksportnya cenderung meningkat pada periode 1987-1992 dibanding periode 1995-2000. Di pihak lain, beberapa produk pertanian yang juga makin menguras devisa adalah sereal, kapas, biji-bijian, sisa olahan dan limbah industri makanan, lemak dan minyak hewani dan nabati, gula dan gula rafinasi.

Dapat disimpulkan bahwa jenis produk pertanian ekspor utama Indonesia tidak banyak berubah antara sebelum dan sesudah OPD terbentuk pada tahun 1994. Ekspor sayuran dan umbi-umbian serta kopi, teh dan olahannya meningkat lebih dari dua kali lipat dari masa sebelum lahirnya OPD, tetapi lebih banyak dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi. Impor gula, sereal, limbah industri pangan dan kapas meningkat lebih dari dua kali lipat dari masa sebelum adanya OPD. Ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional makin rapuh.

3.3. Sistem Ekonomi Indonesia di Tengah Arus Utama Model Ekonomi Masa Kini

Majelis dan para undangan yang saya hormati,

Dinamika sistem ekonomi Indonesia mempunyai pola yang khas mengikuti pendulum kekuatan politik. Namun, pengamatan terhadap kegiatan ekonomi nasional menunjukkan perkembangan dan kebijakannya masih mengabaikan unsur budaya, sosial, dan tata nilai masyarakat. Di masa sistem ekonomi terpimpin, campur tangan pemerintah sangat kuat, sementara keikutsertaan pihak swasta lemah. Di masa Orde Baru, peranan swasta, kapitalis semu atau *ersatz capitalism* (Yoshihara 1988) makin berkembang, tetapi peranan

pemerintah masih cukup kuat. Di era reformasi kini, peranan swasta di satu sisi makin kokoh dan peranan pemerintah di sisi lain makin lemah atas anjuran DMI, BD, dan OPD sejak krisis moneter pada 1997, melalui pedoman kebijakan Konsensus Washington.

Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan komoditas Indonesia hingga tahun 1997 memang menggembirakan, yang merupakan dampak penerapan ekonomi pasar bebas, sehingga Indonesia dijuluki macan Asia. Keruntuhan Uni Soviet dan Eropa Timur pada awal 1990an makin mendorong sistem ekonomi Indonesia mengarah pada kapitalisme Barat. Namun, Mubyarto (2002) meragukan capaian ini sebagai dampak persaingan bebas yang diidamkan ilmu ekonomi neoklasik, karena semua ini ternyata lenyap pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan kerusuhan sosial pada tahun 1998. Krisis ini terjadi karena unsur kelembagaan dan tata nilai masyarakat kurang diperhatikan dalam mengelola perekonomian, sebagaimana dikatakan oleh North (1993), padahal North (1993), Nitisastro (*dalam* Anwar dkk. 1997) dan Aziz (1997) telah mengungkapkan peran kelembagaan sangat penting.

Akibat pengabaian faktor sosial, budaya, dan kelembagaan oleh Konsensus Washington, beberapa ahli ekonomi nasional dan dunia berpendapat bahwa kebijakan liberalisasi ekonomi di Indonesia menyebabkan ekonomi sulit pulih dari krisis sampai saat ini (Stiglitz 2002). Stiglitz (2002, 2006) mencatat, resep kebijakan DMI dan BD yang berperan besar dalam perekonomian banyak negara berkembang dan demi globalisasi dan liberalisasi ekonomi ternyata tidak selalu tepat. Konsensus Washington lemah karena kurang memperhatikan unsur pemerataan, lapangan kerja, dan persaingan untuk menjalankan reformasi ekonomi atau dalam cara melaksanakan privatisasi. Konsensus Washington juga terlalu menekankan kepada peningkatan PDB, bukan pada hal-hal yang

menyangkut baku hidup masyarakat dan tidak menaruh perhatian pada ke-berlanjutan pertumbuhan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Padahal Djojohadikusumo (1992) telah mengingatkan, kelemahan pembangunan nasional yang selama ini belum teratasi terletak pada masalah kesempatan kerja produktif dan pengangguran, ketidakseimbangan antar-daerah, ketimpangan pada perimbangan kekuatan ekonomi di antara golongan masyarakat dalam proses produksi dan penyebaran barang dan jasa. Sebagai contoh, dalam kondisi tingkat pengangguran masih tinggi, efisiensi ekonomi bukan pertimbangan utama (Reithmuller *et al.* 1999).

3.4. Perbedaan Hakikat antara Ekonomi Negara Maju dan Ekonomi Indonesia

Perlu disadari, sistem perekonomian nasional berbeda dengan sistem ekonomi yang dicirikan oleh ajaran ekonomi arus utama. Perbedaan ini dapat dilihat dalam empat indikator pokok:

(1) Jumlah penduduk miskin Indonesia sangat besar. Dengan definisi global ambang batas garis kemiskinan pendapatan 2 dolar AS per hari per kepala, sekitar 66% penduduk Indonesia termasuk miskin (Cline 2004). Sementara di negara-negara industri, jumlah orang berpenghasilan di bawah 2 dolar AS per hari (termasuk tenaga penganggur dan gelandangan) relatif sedikit dibanding 840 juta penduduknya.

(2) Jumlah penduduk bekerja di pertanian sangat besar. Percaturan global perundingan perdagangan saat ini menggambarkan kenyataan hakiki struktur ekonomi dan mata pencaharian penduduk dunia yang berbeda. Di negara kaya, banyak penduduk yang bekerja di sektor industri jasa atau manufaktur, dan sedikit yang mencari kehidupan di sektor pertanian, di bawah 6%. Di Perancis, kurang dari

3% penduduknya terlibat di usahatani, di Amerika Serikat kurang dari 2%, di Spanyol 6%, Italia 5%, Jepang 3%, dan Jerman 2% (Polaski 2005). Di Indonesia, 46% angkatan kerja adalah petani dan buruh tani yang miskin.

(3) Perbedaan tata nilai dan kelembagaan masyarakat. Indonesia tergolong ke dalam kelompok besar negara berkembang, yang mempunyai ciri pertanian antara lain subsisten, pangsa terhadap PDB tinggi, pangsa penduduk yang terlibat pertanian tinggi, pengeluaran konsumsi pangan tinggi, produktivitas rendah, luas pemilikan lahan usahatani terbatas, prasarana pertanian sangat terbatas, orientasi pasar lemah, dan penerapan ilmu pengetahuan rendah. Hal ini telah dicatat oleh literatur dan sejarah di mana Indonesia dan negara berkembang sebagai ekonomi berwajah dua (*dual economy*) (Boeke 1953, Higgins 1955, Lewis 1970 dan 1976 (*dalam* van der Eng 1993). Di satu sisi, perusahaan besar, mutakhir, dan padat modal bergerak di bidang perkebunan dengan produk tujuan ekspor. Di sisi lain, perusahaan kecil dan padat karya bergerak untuk kebutuhan bahan pangan domestik.

(4) Perbedaan di bidang perdagangan pertanian. Tarif pertanian Indonesia lebih tinggi dari negara maju, tetapi bagi produk olahan pertanian, misalnya pada produk tembakau, konsentrat susu, dan keju, tingkat perlindungan pasar lebih rendah dari Eropa Barat dan Jepang. Frekuensi puncak tarif produk pertanian yang umum ditemukan terjadi pada daging sapi dan coklat (UNCTAD 2003). Bahkan produk-produk ini juga dilindungi oleh *Special Agricultural Safeguard* dan mendapat subsidi di negara maju. Ini tidak atau jarang dilakukan di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya.

IV. STRATEGI MENGATASI JEBAKAN GLOBALISASI DAN LIBERALISASI PERTANIAN

4.1. Domestifikasi Pembangunan Ekonomi dan Pertanian

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang terhormat,

Masalah pembangunan ekonomi dan pertanian domestik, seperti keterbatasan lahan dan perlindungan terhadap petani harus diselesaikan melalui kemampuan menginternalisasi masalah tersebut dalam kerangka sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, keadaan dan keterbatasan sumberdaya nasional perlu betul-betul dipahami dan jawaban atas masalah yang dihadapi harus dicari melalui kemampuan dan sumber daya yang dimiliki . Untuk mendapatkan saran-saran dan rekomendasi kebijakan ekonomi dan pembangunan sudah selayaknya Indonesia mempunyai perangkat analisis dan model ekonomi yang lebih sesuai, agar tidak selalu bergantung pada anjuran kebijakan dari para ahli yang kurang memahami tata nilai, pranata sosial, dan budaya masyarakat. Pandangan kritis terhadap anjuran kebijakan lembaga internasional pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, seperti Konsensus Washington, seharusnya menjadi pendorong dalam membangun model analisis tandingan.

Untuk itu para ahli nasional perlu membangun model analisis ekonomi sendiri. Para ahli ekonomi dan pertanian yang merancang kebijakan atau program komoditas perlu berhati-hati dan menyadari bahwa pendekatan yang berbeda akan memberikan hasil analisis yang berbeda dengan implikasi kebijakan yang berbeda pula. Mereka juga harus menyadari kondisi atau iklim usaha atau pasar yang dihadapi atau yang dirasakan petani sesungguhnya.

Untuk mengembangkan perekonomian pertanian, masyarakat hendaknya dididik dan disadarkan secara sungguh-sungguh untuk mencintai produk pertanian dalam negeri dan mengembangkannya sedemikian rupa agar tidak kalah bersaing dengan produk impor. Perlu diyakini, produk pertanian lokal mempunyai citra dan citarasa yang khas dan lebih unggul dari produk pertanian impor.

Indonesia perlu pula memiliki program yang jelas untuk mengubah kebiasaan mengeksport produk pertanian dalam bentuk bahan baku primer. Selama puluhan tahun, manfaat yang diperoleh petani dari ekspor produk bahan mentah tidak berarti. Sudah saatnya Indonesia mengembangkan produk agroindustri setengah jadi atau olahan. Diversifikasi pada pengolahan tahap pertama untuk meningkatkan nilai tambah produk primer akan memberikan masa depan yang positif bagi produk pangan, perkebunan, ternak, dan minyak nabati.

Pengalaman pada tahun 1970an membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam pembangunan tetap diperlukan. Tidak bijaksana apabila mengandalkan kinerja ekonomi dalam genggamannya mekanisme pasar semata. Namun, campur tangan pemerintah itu tidak menciptakan pelaku-pelaku pemburu rente. Untuk itu diperlukan undang-undang, peraturan dan pelaksanaan hukum dan keterlibatan masyarakat untuk mengawasinya.

4.2. Investasi Sarana dan Prasarana Pendukung Pembangunan Pertanian

Evenson *et al.* (1997) dan Hutabarat dkk. (2001) mencatat bahwa investasi penelitian di Indonesia memberikan sumbangan yang sama besarnya dengan pengaruh masukan mutakhir seperti traktor, infrastruktur irigasi, dan pupuk, sedangkan masukan tradisional seperti lahan dan tenaga kerja memberikan sumbangan yang kecil.

Investasi publik pada irigasi dan sarana jalan pedesaan, perbaikan pengelolaan irigasi, peningkatan investasi penelitian dan penyuluhan yang efektif, perbaikan sistem penyaluran kredit dan langkah-langkah inovatif pemasaran yang melibatkan petani atau kelompok tani diperlukan untuk mendukung penganeka-ragaman pertanian nasional. Upaya penganekaragaman produksi diperlukan di bidang perkebunan, perunggasan, hortikultura dan biofarmaka. Cakupan pengembangan industri pengolahan pertanian sangat luas dan ini akan membantu peningkatan pendapatan petani jika mereka dilibatkan.

4.3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Secara Bijaksana

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya hormati,

Cadangan sumber daya energi yang masih ada sebaiknya dikelola sendiri dan dimanfaatkan untuk memakmurkan rakyat. Indonesia sejak 20 tahun lalu seharusnya tidak lagi mengandalkan devisa dari ekspor sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan seperti ladang-ladang minyak dan gas alam, melainkan dari produk-produk yang dapat terbarukan. Kebutuhan pengembangan energi tandingan dari bahan terbarukan, seperti jarak pagar, jagung, kapuk atau randu, ubi kayu, kelapa, kelapa sawit, buah nyamplung, sagu, dan bahkan limbah ternak untuk pengurangan gas rumah kaca juga diperlukan. Di sini peran pertanian sangat diperlukan, karena tanaman dapat mengubah tenaga surya ke dalam sumber daya energi melalui produksi pertanian dan pada saat yang sama memelihara lingkungan dan menciptakan lapangan kerja.

Untuk itu diperlukan upaya sungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Keikutsertaan petani sebagai pelaku pembangunan

pertanian seyogianya menjadi perhatian utama. Pemborosan sumber daya energi tidak terbarukan yang terjadi saat ini akan dibayar mahal oleh generasi penerus. Karena itu, pada setiap tingkat administrasi pemerintahan harus dibangun kesadaran akan keterbatasan lingkungan dan dampak buruk pola konsumsi sumber daya alam tidak terbarukan.

4.4. Revitalisasi Negosiasi Perdagangan Internasional

Politik bebas aktif dapat dimaknai sebagai keikutsertaan dalam berbagai forum multilateral, internasional, regional, dan bilateral pada berbagai bidang ekonomi, politik, perdagangan dan lain-lain. Namun, negosiasi perdagangan yang diikuti Indonesia sebaiknya tidak semata-mata demi kelancaran dan kepentingan perdagangan itu sendiri. Perlu disadari, perdagangan adalah alat untuk mencapai tujuan negara, antara lain kemakmuran, kemantapan dan kedaulatan ekonomi, kebebasan, dan perbaikan mutu kehidupan masyarakat. Untuk itu Indonesia patut turut serta membangun perundingan yang konstruktif, positif, dan luwes. Bersama dengan kelompoknya, Indonesia harus berusaha membawa kesepakatan perdagangan pertanian dunia tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai, dan tidak bias ke orientasi pasar bebas semata dan melupakan pertimbangan keadilan dalam perdagangan.

“A Global Human Society ... characterized by Islands of Wealth, surrounded by a Sea of Poverty is unsustainable” (Mbeki 2002)

Pada forum *AFTA* bersama negara tetangga di Asia Tenggara dan bersama Cina dalam Indonesia-Cina *FTA*, Indonesia harus aktif dan mengkaji secara cermat dan belajar melihat segala kemungkinan dampaknya terhadap sektor pertanian dan pengembalian kepentingan

di sektor ini. Pada forum multilateral OPD, Indonesia melalui koalisinya dengan Kelompok 33, Kelompok 20, dan lain-lain harus tetap mengusung kepentingan petani di negara berkembang yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan fasilitas *SP* dan *SSM*. Semua ini memerlukan negosiasi yang sangat intensif, baik ke dalam maupun ke luar kelompoknya. Penetapan posisi kesepakatan perdagangan dalam sistem multilateral atau kawasan seyogianya memper-timbangkan secara masak-masak peluang Indonesia dan negara berkembang lainnya mengejar nilai-nilai sosial dan membangun diri sendiri.

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya hormati,

Indonesia saat ini berada dalam arus perdagangan bebas, yang diciptakan berbagai perangkat kelembagaan publik internasional yang menjunjung dan menganjurkan pembatasan peran pemerintah, deregulasi, liberalisasi dan privatisasi secara cepat. Hal ini telah menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan sektor pertanian dan perekonomian Indonesia, antara lain melalui: (i) dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang masih diterpa krisis moneter, (ii) sasaran- sasaran yang tersirat dari mukadimah OPD dan PP telah bergeser, dan (iii) kebangkitan kekuatan monopoli, oligopoli dan keterpaduan vertikal perusahaan lintas negara dan multibangsa yang makin subur dan kokoh di berbagai bidang, antara lain produksi benih, pemasaran, distribusi dan pasar eceran pertanian.

“GATT (WTO) seeks to tie all the dogs’ tails together so tightly that the international knot will wag the separate national dogs,”

(Daly 1994).

Namun, badai globalisasi dan liberalisasi tidak mungkin berlalu, bahkan cakupannya akan makin luas, apalagi di era milenial yang sedang dilalui saat ini. Untuk itu diusulkan beberapa kebijakan agar pertanian nasional tidak terjebak di dalamnya, yakni: (i) domestifikasi pembangunan ekonomi dan pertanian, (ii) investasi sarana dan prasarana pendukung pembangunan pertanian, (iii) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi secara bijaksana, dan (iv) revitalisasi negosiasi perdagangan internasional. Agar globalisasi dan liberalisasi menguntungkan dibutuhkan kesiapan dan kesigapan semua pemangku kepentingan di bidang pertanian dan ekonomi untuk menciptakan keseimbangan kekuatan pasar dan campur tangan pemerintah, kekuatan ekonomi dan politik di setiap tingkatan: internasional, nasional, dan lokal.

Proses reformasi yang masih sedang berjalan sementara ini telah memberikan banyak hal-hal positif di bidang kebebasan berpendapat dan berpolitik. Namun, hal ini perlu dilihat dan dinilai kembali manfaatnya terhadap kesejahteraan warga masyarakat dan keseimbangan kekuatan pasar dan negara dengan mempertimbangkan perkembangan dan kecenderungan global yang baru secara terus-menerus. Tantangan pembangunan pertanian dan ekonomi nasional tidak akan terselesaikan dengan mengandalkan bantuan material, dan finansial dari luar. Indonesia harus melakukannya secara bersungguh-sungguh, sejak hari ini, dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.

VI. PENUTUP

Bekal yang paling baik untuk mengarungi samudera ketidakpastian global yang dihadapi kini dan seterusnya adalah mengutamakan produksi domestik untuk pasar domestik, dengan penyeimbangan perdagangan internasional sebagai pilihan kedua, tetapi bukan untuk mengatur pasar domestik.

“The domestic economy should be the dog and international trade its tail,” (Daly 1994).

Untuk itu penulis ingin menyampaikan sebuah pesan yang disampaikan Bush (2002) yang kiranya relevan juga bagi kita:

“This nation has got to eat. It’s in our national security interests that we be able to feed ourselves. Thank goodness, we don’t have to rely on somebody else’s meat to make sure our people are healthy and well fed.”

Sebagai ucapan terakhir izinkanlah penulis mengutip sepotong sajak Ismail (1988):

*“...Karena rendah diri pada bangsa-bangsa dunia
Kita gadaikan sikap bersahaja kita
Karena malu dianggap bangsa miskin tak berharta
Kita pinjam uang mereka membeli benda mereka
Harta kita mahal tak terkira, harga diri kita
Digantung di etalase kantor Pegadaian Dunia...”*

Akhirul kata, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan terima kasih kepada Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin sekalian. Semoga Tuhan YMK selalu menyertai kita sekalian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya muliakan

Orasi ilmiah ini harus saya akhiri dengan sekali lagi menyampaikan puji dan rasa syukur kepada TUHAN YME, atas izinNya saya dapat membacakan bahan orasi pada hari ini.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada banyak pribadi atau lembaga yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Mereka antara lain para petani, pengambil kebijakan, manajer, pedagang di berbagai wilayah yang pernah bertemu dengan saya dan lembaga-lembaga lain.

Kepada kedua orang tua saya, Jamahadim Waldemar Hutabarat dan Tienni Tampubolon yang keduanya telah tiada, saya haturkan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Budi baik dan belaian kasih sayang mereka tidak mungkin dapat saya balas. Mereka juga telah mengajarkan pada saya tentang harga diri, ketulusan, kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan risiko dalam menapaki kehidupan.

Dalam perjalanan karier sebagai peneliti dan pengamalan ilmu, saya didorong dan diberi banyak kesempatan oleh Bapak Dr Ir Tahlim Sudaryanto, Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian/PSE-KP saat ini dan Prof. Dr Ir Pantjar Simatupang, mantan Kepala PSE-KP. Dr Ir Faisal Kasryno dan Prof. Dr Ir Effendi Pasandaran, Prof. Dr Ir Achmad Suryana, ketiganya mantan Kepala Pusat Agro Ekonomi/PAE telah memberikan kebebasan dan lingkungan yang kondusif bagi saya untuk menekuni penelitian. Untuk itu kepada mereka semua disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semua rekan di PSE-KP juga banyak membantu saya dengan melapangkan jalan untuk meniti karier peneliti, melalui berbagai

diskusi dan pertukaran gagasan dan terutama dalam melakukan tugas lapang bersama-sama serta menyiapkan laporan-laporan tim.

Jasa Prof. Dr Ir Sjarifuddin Baharsjah dari Institut Pertanian Bogor, Kepala PAE yang pertama tidak mungkin saya lupakan. Beliau merintis jalan, mendorong dan bahkan memberi kepercayaan penuh kepada saya untuk memanfaatkan sumberdaya yang sangat terbatas bangsa ini sebagai suatu investasi di penelitian ekonomi pertanian. Kepada beliau saya sangat berhutang budi dan saya menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan harus mengakui investasi beliau belum kembali dan saya kira tidak mungkin kembali.

Pertemuan dan saling tukar pendapat dengan Ibi-ibu dan Bapak-bapak di TIM Nasional Perundingan Perdagangan Internasional/TIMNAS PPI telah memberi pelajaran bagi saya untuk merenungkan kembali tentang makna perdagangan komoditas, apalagi menyangkut komoditas suatu negara berpenduduk besar. Saya menyampaikan hormat dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada Bapak Prof. D. S. Damardjati, Dr Ir T. A. Napitupulu, Dr Ir D. A. Azahari, Ir R. Danasaputra, Ir Ferial Lubis, Ir Aderina Panggabean MAgr, Ir Dedi Junaedi, Ir Komaruddin, Dr Ir Donna Gultom dari Ditjen PPHP; Bapak Dr M.H.Sawit dari PSE-KP; Bapak Gusmardi Bustami S.H., Drs Eddy Yusuf, Judha dan M.I. Derry Aman dari PTRI Jenewa; Drs Armanatha Nasir dan Ir Tika Wihanasari dari Departemen Luar Negeri; Bapak H. Soetanto, Dr Ir. Erwidodo, Dr D. Saleh, Syamsul B. Siregar, Sumber Sinabutar S.H., Ir Adrian Lubis, Drs M. Sihombing, Drs Untung dari Departemen Perdagangan.

Rasa hormat dan penghargaan, saya sampaikan kepada para anggota tim penilai, panitia penyelenggara Pengukuhan Profesor Riset Badan Litbang Pertanian dan anggota tim penilai dan Kepala LIPI, Prof. Dr. Umar Anggara Jenie, atas saran-saran perbaikan dan dorongan dan jerih payah mereka dalam materi dan penyelenggaraan acara orasi yang meriah ini. Demikian pula kepada seluruh hadirin

atas kesediaannya menghadiri, mendengarkan gagasan-gagasan yang disampaikan serta mengikuti dengan sabar orasi saya ini.

Yang terakhir, saya persembahkan terima kasih dan penghargaan saya kepada Ida (Hotnida C.H. Siregar), istri tercinta yang menjadi pengedit pertama naskah orasi ini dan kepada buah hati kami, Tamaria Jesika dan Jogi Wiliam yang berangkat remaja yang mungkin belum memahami arti pilihan hidup Ayahnya, selalu memberi semangat sekaligus ketenangan kepada saya dalam mengarungi riak dan gelombang hidup yang tak henti, melalui kasih sayang mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Achterbosch, T.J., B. Hutabarat, N. Syafaat dan F.W van Tongeren. 2004. Indonesian interests in the Agricultural Negotiations under the Doha Development Agenda: An Analysis of the "July 2004 Framework". *Jurnal Agro Ekonomi/JAE* 22 (2): 97-118.
- ADB. 2007. Inequality in Asia: Key Indicators 2007 Special Chapter Highlights. Asian Development Bank, Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines. <http://www.adb.org/>.
- Anderson, K., W. Martin, and D. van der Mensbrugghe. 2005. Market and Welfare Implications of Doha Reform Scenarios. In K. Anderson and W. Martin (Eds.). *Agricultural Trade Reform and the Doha Development Agenda*, World Bank. Washington D.C.
- Antweiler, W. and D. Trefler. 2002. Increasing returns and all that: a view from trade. *American Economic Review* 92(1): 93-119.

- Anwar, M.A., A. Ananta dan A. Kuncoro. 1997. Pendahuluan. *Dalam* Anwar, A. , A. Ananta dan A. Kuncoro (Penyunting). Widjojo Nitisastro 70 tahun, Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan, dan Pelaksanaan. Buku I. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Hal. xii-xix.
- Azis, I. J. 1997. Antara Teori dan Intuisi. *Dalam* Anwar, A., A. Ananta dan A. Kuncoro (Penyunting). Widjojo Nitisastro 70 tahun, Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan, dan Pelaksanaan. Buku I. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Hal. 145-162.
- Barker, D. and J. Mander. 1999. Invisible Government the World Trade Organization: Global Government for the New Millennium? A Primer. The International Forum on Globalization (IFG). San Francisco. <http://www.ifg.org/>. Diakses Juli 2007.
- Boeke, J.H. 1953. Economics and Economic Policies of Dual Societies as exemplified by Indonesia. Institute of Public Relations. New York.
- Booth, A. 1992. International Trade and Domestic Economic Development: An Indonesian Case Study. *Dalam* M. A. Anwar, T. K. Wie, and I. J. Azis (Eds). Pemikiran, Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bush, G. W. 2002. Pidato pada sidang tahunan dan pameran perdagangan di Denver, Colorado, 8 February 2002.
- Cline, W. R. 2004. Trade Policy and Global Poverty. Institute for International Economics. <http://bookstore.petersoninstitute.org/>. Diakses November 2006.

- Cochrane, W. W. 2000. American Agriculture in an Uncertain Global Economy. University of Minnesota Extension No. 700 Spring 2000. <http://www.extension.umn.edu/>. Diakses Agustus 2007.
- Daly, H.E. 1994. Against Free Trade: Neoclassical and Steady-state Perspectives. Prepared for the Conference on Trade and the Environment, Pacific Basin Research Center, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, April 29-30, 1994.
- Daly, H.E. and J. Cobb Jr. 1989. For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment, and a Sustainable Future. Beacon Press. Boston.
- Dapice, D.O. 1987. Tinjauan Ekonomi Indonesia. *Dalam* G. F. Papanek (Penyunting). Ekonomi Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Djojohadikusumo, S. 1992. Pendekatan Ekonomi terhadap Perspektif Sejarah. *Dalam* M.A. Anwar, T.K. Wie, and I.J. Azis (Eds). Pemikiran, Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dollar, D. and A. Kraay. 2002. Growth is Good for the Poor. *Journal of Economic Growth*, 7 (3): 195-225. *Reprinted in* A. Shorrocks and R. van der Hoeven (Eds), *Growth, Inequality, and Poverty* (2004). Oxford University Press for UNUWIDER. Oxford.
- Dollar, D., and A. Kraay. 2004. Trade, Growth and Poverty. *Economic Journal* 114 (493): F22-F49.
- Erwidodo and T. Feridhanisetyawan. 1997. Indonesia's Agriculture: Facing the APEC and WTO. Paper presented at the Workshop during the 41st Annual Conference of Australian Agriculture and Resource Economics Society. 20-25 January 1997.

- Evenson, R. E., E. Abdurachman, Budiman Hutabarat, A. C. Tubagus. 1997. Contribution of research on food and horticultural crops in Indonesia: An economic analysis. *Economics and Finance in Indonesia* 45 (4): 551-578.
- Friedman, T. L. 2000. *The Lexus and the Olive Tree*. Farrar, Straus & Giroux, New York.
- Hahnel, R. 2002. *The ABCs of Political Economy: A Modern Approach*. Pluto Press. London, Sterling, Virginia.
- Higgins, B. 1955. The 'Dualistic Theory' of Underdeveloped Areas. *Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI)* 58-78.
- Hutabarat, Budiman. 1987. Rice Farmer's Risk Attitude: An Analysis of Production Risk in West Java. *Jurnal Agro Ekonomi/JAE* 6 (1&2): 51-56.
- Hutabarat, Budiman, H. Supriyadi, A. K. Zakaria dan Y. Supriyatna. 2003. Analisis Dampak Liberalisasi Perdagangan dan Standarisasi Produk Pertanian terhadap Daya Saing Komoditas Perkebunan Utama. Laporan Akhir Penelitian. PSE, Bogor.
- Hutabarat, Budiman. 2004. Kondisi Pasar Dunia dan Dampaknya terhadap Kinerja Industri Perkopian Nasional. *Jurnal Agro Ekonomi/JAE* 22 (2): 147-166.
- Hutabarat, Budiman. 2005. Upsurging Livestock Feed Demand in Southeast Asia: A Consolidated Discussion. In Lokollo, E. M. and Budiman Hutabarat. (Eds). *Prospects of Feed Crops in Southeast Asia: Alternative to Alleviate Poverty through Secondary Crops' Development*. Proceedings of the Regional Workshop. Bogor, Indonesia, September 14-15, 2004. CAPSA Monograph No. 47; pp. 177-205.

- Hutabarat, Budiman. 2006. Analisis Saling Pengaruh Harga Kopi Indonesia dan Dunia. *Jurnal Agro Ekonomi/JAE* 24 (1): 21-40.
- Hutabarat, Budiman. 2007. Produk Pertanian Indonesia di Pusaran Akses Pasar Perdagangan Internasional. Makalah disampaikan pada pelatihan International Agricultural Trade Policy yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian di Ciawi, Bogor, 23-27 April 2007.
- Hutabarat, Budiman, T. Pranadji dan A. Nasution. 1989. Perlakuan Pasca Panen dan Pemasaran Kelapa. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Hutabarat, Budiman, Y. Yusdja, Y. Saefudin. 1990. Ekonomi Unggas dan Prospeknya untuk Konsumsi dalam Negeri dan Ekspor. Dalam A. Suryana, F. Kasryno dan E. Pasandaran (*Penyunting*). Kontribusi Sektor Pertanian dalam Peningkatan Ekspor Non Migas. PAE, Bogor.
- Hutabarat, Budiman, B. Santoso, S. Bachri, B. Winarso, dan R. Hendayana. 1992. Studi Keunggulan Kompetitif Komoditas Perkebunan dan Peternakan. Laporan Hasil Penelitian. PSE. Bogor.
- Hutabarat, Budiman, Y. Yusdja, E. Basuno, A. Subekti, I. Sadikin, V. Siagian. 1993. Pola Perdagangan Wilayah Komoditas Jagung di Indonesia. Research Report. CASER. Bogor.

- Hutabarat, Budiman dan Y. YUSDJA. 1995. Dominansi industri pakan dalam penentuan harga jagung: Suatu ciri pola kemitraan yang suboptimal. *Dalam* Hermanto, M. H. Sawit, A. Zulham, and Sunarsih (Eds). Volume 2. Prosiding Profil Kelembagaan Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian dan Prospek Pengembangan Agribisnis di Indonesia: 133-152. CASER, Bogor.
- Hutabarat, Budiman, A. Djauhari, A. Agustian, T. D. Permata, B. Rachman dan J. Situmorang. 1997. Potensi dan Peluang Pemanfaatan Sumberdaya Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan di Luar Jawa. Laporan Hasil Penelitian. PSE. Bogor.
- Hutabarat, Budiman, H. Mayrowani, B. Rahmanto, B. Winarso, M. Iqbal, H. Supriyadi, J. Situmorang, M.S.M. Tambunan, B. S. Abbas dan K. Suradisastra. 1998. Potensi dan Peluang Pemanfaatan Sumber-sumber Pertumbuhan Produksi Pertanian Unggulan di Kalimantan. Laporan Hasil Penelitian. PSE. Bogor.
- Hutabarat, Budiman dan A. Agustian. 1998. Potensi dan Peluang Pemanfaatan Sumberdaya Pertumbuhan Produksi Jagung dan Kedelai di Sumatera Selatan. *Dalam* A. Suryana, I W. Rusastra, M. Rachmat dan A. Purwoto (*Penyunting*). Prosiding Dinamika Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian. Buku I. PSE. Bogor.
- Hutabarat, Budiman, R. Kustiari, B. Rahmanto, H. Tarigan dan A. Askin. 2001. Analisis Dampak Investasi Publik terhadap Sektor Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. PSE. Bogor.
- Hutabarat, Budiman, H. Supriyadi, A. K. Zakaria dan Y. Supriyatna. 2003. Analisis Dampak Liberalisasi Perdagangan dan Standarisasi Produk Pertanian terhadap Daya Saing komoditas Perkebunan Utama. Laporan Akhir Penelitian. PSE. Bogor.

- Hutabarat, Budiman dan B. Rahmanto. 2004. Dimensi Oligoponistik Pasar Domestik Cabai Merah. *SOCA* 4 (1): 45-56.
- Hutabarat, Budiman, M. H. Sawit, Supriyati, B. Rahmanto, A. Setyanto, H. J. Purba. 2004. Penyusunan Bahan Advokasi Delegasi Indonesia dalam Perundingan Multilateral. Laporan Hasil . PSE, Bogor.
- Hutabarat, Budiman, M. H. Sawit, A. Setiyanto, H. J. Purba, S. Nuryanti, J. Hestina. 2005. Analisa Perubahan dan Dampak Perdagangan Bebas Regional dan Penetapan Modalitas Perjanjian Multilateral di Sektor Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. PSE-KP, Bogor.
- Hutabarat, Budiman, S. K. Dermoredjo, H. J. Purba, E. M. Lokollo, Wahida. 2006. Analisa Notifikasi Dalam Kerangka Modalitas Perjanjian Pertanian WTO. Laporan Hasil Penelitian. PSE-KP, Bogor.
- Hutabarat, Budiman, M.H. Sawit, S. K. Dermoredjo, Wahida, H.J. Purba dan S. Nuryanti. 2007. Analisis Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia-China dan Kerjasama AFTA dan Dampaknya terhadap Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia. Laporan Hasil Penelitian. PSE-KP, Bogor.
- Hutabarat, Budiman dan S. K. Dermoredjo. 2008. Pengaruh Pemotongan Bantuan Domestik di Negara Maju terhadap Ekonomi Pangan Indonesia, *Majalah PANGAN* 50/XVII: 30-49.
- Ismail, T. 1998. Kalian Cetak Kami Jadi Bangsa Pengemis, Lalu Kalian Paksa Kami Masuk Masa Penjajahan Baru, kata Si Toni.
- Keen, S. 2001. Debunking Economics: The Naked Emperor of the Social Sciences. Pluto Press, Sydney.

- Krugman, P. R. 1987. Is Free Trade Passe?. *The Journal of Economic Perspectives* 1(2): pp. 131-144.
- Mackie, J. 1992. Dualism and Market Segmentation in Indonesia. *Dalam* M. A. Anwar, T. K. Wie, and I. J. Azis (Eds). *Pemikiran, Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marisa, Y. and B. Hutabarat. 1988. Ragam sumber pendapatan rumahtangga di pedesaan Sulawesi Selatan. *Dalam* F. Kasryno, A. Suryana, A. Djauhari, P. Simatupang, B. Hutabarat, C. A. Rasahan (Eds). *Changes in Rural Economy. Proceedings of National Farmer Panel*. CAER, AARD. Bogor.
- Mbeki, T. 2002. Opening Speech at the The World Summit on Sustainable Development. Johannesburg. August 26, 2002. <http://news.bbc.co.uk/>. Di akses 1 April 2008.
- Milanovic, B. 2004. Can We Discern the Effect of Globalization on Income Distribution?. *World Bank Economic Review*, forthcoming.
- Mubyarto. 2002. Peran Ilmu Ekonomi dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. *Dalam* S. Noor, Evimiyadi, B. Yoshiadhe, D. S. Passandaran (Penyunting). *Membangun Ketahanan Ekonomi Indonesia Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.
- Murphy, S. 2002. *Managing the Invisible Hand Markets, Farmers and International Trade*. Institute for Agriculture and Trade Policy. Minneapolis, Minnesota.
- Murphy, S. 2006. Concentrated Market Power and Agricultural Trade. *Ecofair Trade Dialogue. Discussion Papers No. 1*.

- Nelson, R. H. 2001. *Economics As Religion: From Samuelson to Chicago and Beyond*. Pennsylvania State University Press. University Park, Pennsylvania.
- Nicholson, N. 1988. The State of the Art. *In* V. Ostrom, D. Feeny, and H. Picht (Eds). *Rethinking Institutional Analysis and Development: Issues, Alternatives, And Choices*. International Center for Economic Growth affiliated with the Institute for Contemporary Studies. San Francisco.
- North, D. C. 1993. Economic Performance Through Time. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993: Prize Lecture. The Noble Foundation, Sweden.
- Ormerod, P. 2001. Revisiting The Death of Economics. *World Economics* 2(2): 1-14.
- Piggott, R. R., K. A. Parton, E. M. Treadgold and B. Hutabarat. 1993. *Food Price Policy in Indonesia*. ACIAR Monograph Series 22. Australian Centre for International Agricultural Research. Canberra.
- Polaski, S. 2005. Agricultural Negotiations at the WTO: First, Do No Harm. Policy Outlook. Carnegie Endowment for International Peace. <http://www.carnegieendowment.org/>. Diakses November 2006.
- Polaski, S. 2006. Winners and Losers: The Impact of the Doha Round on Developing Countries. Carnegie Endowment for International Peace. <http://www.carnegieendowment.org/>. Diakses November 2006.

- Purba, H.J., Budiman Hutabarat dan S. Nuryanti. 2007. Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Kinerja Ekonomi Komoditas Pertanian Indonesia: Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Agro Ekonomi/JAE* 25 (1): 84-102.
- Rachmat, M. and B. Hutabarat. 1988. "Tingkat penerapan diversifikasi usahatani dan pengaruhnya terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 6 (2): 23-32.
- Rachmat, M., B. Hutabarat, Wirawan, R. S. Rivai, T. Pranadji, R. N. Suhaeti. 1988. Pengelolaan Irigasi dan Diversifikasi Pertanian di Lampung. Research Report. Collaborative Research Project between Development Planning of Water Resources, Ministry of Public Works (MOPW) and CAER, MOA. Bogor, Indonesia.
- Ravallion, M. 2001. "Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages," *World Development* 29 (11):1803-1815.
- Reid, A. J. S. 1984. "The Pre-Colonial Economy of Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 20 (2): 151-167.
- Reithmuller, P, J. Chai, D. Smith, B. Hutabarat, B. Sayaka, Y. Yusdja. 1999. "The mixing ratio in the Indonesian dairy industry," *Agricultural Economics* 20: 51-56.
- Ricardo, D. 1821. On The Principles of Political Economy and Taxation. Third Edition. London: John Murray, Albemarle-Street. <http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/>. Diakses 1 April 2008.
- Ritchie, M., S. Murphy and M. Lake. 2003. United States Dumping on World Agricultural Markets. Institute for Agriculture and Trade Policy. Minneapolis, Minnesota.

- Sayaka, B. 2006. "Market structure of the seed industry in East Java," *Jurnal Agro Ekonomi/JAE* 24 (2): 133-156.
- Sayaka, B. and B. Hutabarat. 1996. "Ragam sumber pendapatan petani padi sawah di Kalimantan Tengah: Studi kasus di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas," *Jurnal Agro Ekonomi/JAE* 15 (1): 41 – 47.
- Smith, A. 1776. *An Inquiry into the Nature And Causes of the Wealth of Nations*. Printed for W. Strahan and T Cadell in the Strand. London. <http://adamsmith.org/>. Diakses 1 April 2008.
- Stiglitz, J. E. 2002. *Globalization and Its Discontents*. W. W. Norton & Co.. New York and London.
- Stiglitz, J. E. 2006. *Making Globalization Work*. Paperback Edition. W. W. Norton & Co.. New York and London.
- Stiglitz, J. E. and A. Charlton. 2005. *Fair Trade For All: How Trade Can Promote Development*. Oxford University Press. Oxford.
- Sullivan, D., A. Doherty, R. Hall and O. Hoedeman (Eds.). 2003. *Business Rules: Who Pays the Price? How Corporate Influence in the WTO Impacts People and the Environment*. Friends of the Earth International. Amsterdam.
- Sumardjan, S. 2002. *Ekonomi dengan Latar Belakang Kebudayaan. Dalam S. Noor, Evimiyadi, B. Yoshiadhie, D. S. Passandaran (Penyunting). Membangun Ketahanan Ekonmi Indonesia Melalui Pemberdayaan Ekonomi-Rakyat*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.

- Tarmidi, L. T. dan M. C. Basri. 1997. Relevansi Teori Perdagangan Internasional Tradisional dan Teori-teori Baru. *Dalam* Anwar, A. , A. Ananta dan A. Kuncoro (Penyunting). Widjojo Nitisastro 70 tahun, Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan, dan Pelaksanaan. Buku I. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Jakarta.
- UNCTAD. 2003. Back to Basics: Market Access Issues in the Doha Agenda. UN, New York and Geneva.
- van der Eng, P. 1993. Agricultural Growth in Indonesia since 1880: Productivity Change and the Impact of Government Policy. Doctoral dissertation at Rijksuniversiteit, Groningen.
- Williamson, J. 2002. Did the Washington Consensus Fail? Outline of speech at the Center for Strategic & International Studies. Institute for International Economics. Washington, DC. <http://www.iie.com/>. Diakses Agustus 2007.
- World Bank. 2002. Global Economic Prospects and the Developing Countries 2002: Making Trade Work for the World's Poor. World Bank. Washington, D.C.
- World Bank. 2005. Global Agricultural Trade and Developing Countries. World Bank. Washington, D.C.
- WTO. 1999. The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. Cambridge University Press. Cambridge.

DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

1. Hutabarat, Budiman dan S. K. Dermoredjo. 2008. Pengaruh Pemotongan Bantuan Domestik di Negara Maju terhadap Ekonomi Pangan Indonesia. *Majalah PANGAN* 50/XVII: 30-49.
2. Purba, H.J., Budiman Hutabarat dan S. Nuryanti. 2007. Dampak Penurunan Bantuan Domestik terhadap Kinerja Ekonomi Komoditas Pertanian Indonesia: Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Agro Ekonomi/JAE* 25 (1): 84-102.
3. Hutabarat, Budiman, M.H. Sawit, S. K. Dermoredjo, Wahida, H.J. Purba dan S. Nuryanti. 2007. Analisis Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia-China dan Kerjasama AFTA dan Dampaknya terhadap Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia. Laporan Hasil Penelitian. PSE-KP, Bogor.
4. Hutabarat, Budiman. 2007. Dasar-dasar dan Teknik Penghitungan Hambatan Perdagangan Pertanian di Pasar Internasional. Makalah disampaikan pada acara "Sosialisasi Tarif Perdagangan Internasional" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada tanggal 24-26 Juli 2007 di Anyer, Banten.
5. Hutabarat, Budiman. dan A. Setyanto. 2007. Komoditas Jeruk Indonesia di Persimpangan Jalan Pasar Domestik dan Internasional "Memanfaatkan Dukungan Inovasi Teknologi dan Membangun Sinergi antar Pelaku Agribisnis dalam Meningkatkan Daya saing Produk Jeruk Nasional", di Yogyakarta, 13-14 Juni 2007.

6. Hutabarat, Budiman. 2007. Produk Pertanian Indonesia di Pusaran Akses Pasar Perdagangan Internasional, ". Makalah disampaikan pada pelatihan "International Agricultural Trade Policy" yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian di Ciawi, Bogor, 23-27 April 2007.
7. Hutabarat, Budiman and B. Rahmanto. 2007. "Aturan dan mekanisme perlindungan terhadap dampak liberalisasi perdagangan untuk siapa?," *Forum Agro Ekonomi* 25 (1): 56-71.
8. Nuryanti, S., Budiman Hutabarat, dan H. J. Purba. 2006. "Peta komoditas pertanian dalam perdagangan bilateral Indonesia-China: Sebuah introspeksi," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 14 (1): 74-117.
9. Hutabarat, Budiman. 2006. Dampak Pungutan/retribusi terhadap Daya Saing Pemasaran Produk Pertanian antar Wilayah. Makalah disampaikan pada "Pertemuan Perumusan Kebijakan Pemasaran Antar Wilayah" pada tanggal 7-8 Desember 2006 di Jakarta Selatan, Jakarta dan pada tanggal 12-13 Desember 2006 di Surabaya, Jawa Timur.
10. Hutabarat, Budiman dan A. Setyanto. 2006. Dampak Penurunan Tarif Impor Jeruk di Indonesia. Disampaikan atas permintaan Direktorat Budidaya Tanaman Buah, Direktorat Jenderal Hortikultura, Departemen Pertanian pada bulan November 2006. PSE-KP. Bogor.
11. Hutabarat, Budiman, H. J. Purba and S. Nuryanti. 2006. "Profil tarif dan skenario usulan penurunan tarif: Implikasi bagi tarif produk pertanian Indonesia dan Negara Anggota G-33," *Jurnal Kebijakan Ekonomi* 2 (2): 107-132.

12. Hutabarat, Budiman and B. Rahmanto. 2006. "Mekanisme perlindungan khusus (*special safeguard mechanism/SSM*) untuk Indonesia dan K 33: Sebuah gagasan," *Agricultural Policy Analysis* 4 (4): 315-326.
13. Hutabarat, Budiman. dan A. Setiyanto. 2006. Kajian Kinerja Perdagangan Bilateral Pertanian Indonesia dan Korea Selatan. Laporan Akhir. PSE-KP. Bogor. May 2006
14. Hutabarat, Budiman 2006. "Analisis saling-pengaruh harga kopi Indonesia dan dunia," *Jurnal Agro Ekonomi* 24 (1): 21-40.
15. Hutabarat, Budiman. S. K. Dermoredjo, H. J. Purba, E. M. Lokollo, Wahida. 2006. Analisa Notifikasi Dalam Kerangka Modalitas Perjanjian Pertanian WTO. Laporan Hasil Penelitian. PSE-KP. Bogor.
16. Hutabarat, Budiman, M. Husein Sawit, H. J. Purba, S. Nuryanti, A. Setiyanto, J. Hestina. 2005. Analisis Perubahan dan Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Regional dan Penetapan Modalitas Perjanjian Multilateral di Sektor Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. PSE-KP. Bogor.
17. M. Husein Sawit, Budiman Hutabarat, A. Setiyanto, H. J. Purba, S. Nuryanti and J. Hestina. 2005. Fleksibilitas pemilihan Special Product/SP usulan Indonesia: Mampukah mencapai sasarannya?. *Agricultural Policy Analysis* 3 (2): 95-107.
18. Lokollo, E. M., Budiman Hutabarat. 2005. "Prospects of Feed Crops in Southeast Asia: Alternative to Alleviate Poverty through Secondary Crops' Development: Introduction," In Lokollo, E. M. and Budiman Hutabarat. (*Eds*). Prospects of Feed Crops in Southeast Asia: Alternative to Alleviate Poverty through Secondary Crops' Development; pp. 7-17. Proceedings of the Regional Workshop. Bogor, Indonesia, September 14-15, 2004. CAPSA Monograph No. 47.

19. Hutabarat, Budiman. 2005. "Upsurging Livestock Feed Demand in Southeast Asia: A Consolidated Discussion," In Lokollo, E. M. and Budiman Hutabarat. (Eds). *Prospects of Feed Crops in Southeast Asia: Alternative to Alleviate Poverty through Secondary Crops' Development*; pp. 177-205. *Proceedings of the Regional Workshop*. Bogor, Indonesia, September 14-15, 2004. CAPSA Monograph No. 47.
20. Achterbosch, T. J, Budiman Hutabarat, N. Syafaat, and F. W. van Tongeren. 2004. "Indonesian interests in the agricultural negotiations under the Doha Development Agenda: An analysis of the "July 2004 Package", " *Jurnal Agro Ekonomi* 22 (2): 97-118.
21. Hutabarat, Budiman, and B. Rahmanto. 2004. "Dimensi Oligoponistik Pasar Domestik Cabai Merah,". *SOCA* 4 (1): 45-56.
22. Hutabarat, Budiman, M. H. Sawit, Supriyati, B. Rahmanto, A. Setyanto, H. J. Purba. 2004. *Penyusunan Bahan Advokasi Delegasi Indonesia dalam Perundingan Multilateral*. Laporan Hasil Penelitian. PSE. Bogor.
23. Hutabarat, Budiman. 2004. "Kondisi Pasar Dunia dan Dampaknya terhadap Kinerja Industri Perkopian Nasional," *Jurnal Agro Ekonomi* 22 (2): 147-166.
24. Hutabarat, Budiman, H. Supriyadi, A. K. Zakaria dan Y. Supriyatna. 2003. *Analisis Dampak Liberalisasi Perdagangan dan Standarisasi Produk Pertanian terhadap Daya Saing Komoditas Perkebunan Utama*. Laporan Akhir Penelitian. PSE-KP. Bogor.
25. Hutabarat, Budiman. 2003. "Feed and the feed crop economy in South Asia," *Palawija News* 20 (2): 1-9.

26. Hutabarat, Budiman, and S.S.E. Ranawana. 2003. Prospects of Feed Crops in South Asia: An Integrated Report. WP 68. UN ESCAP CGPRT Centre. Bogor.
27. Hutabarat, Budiman. 2003. "Prospect of feed crops to support the livestock revolution in South Asia: Framework of the study project," In Budiman Hutabarat (*Ed.*). The CGPRT Feed Crops Supply/Demand and Potential/Constraints for Their Expansion in South Asia. Proceedings. UN ESCAP CGPRT Centre. Bogor. Pp. 7-19.
28. Hutabarat, Budiman. 2003. The CGPRT Feed Crops Supply/Demand and Potential/Constraints for Their Expansion in South Asia. Proceedings of a Workshop Held in Bogor, September 3-4, 2002. UN ESCAP CGPRT Centre. Bogor.
29. Hutabarat, Budiman, W. Sudana, A. Agustian, B. Winarso, and I. Sadikin. 2002. Analisis Kebijakan Investasi dan Insentif dalam Mendukung Pengembangan Subsektor Hortikultura dan Perkebunan. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Bogor.
30. Hutabarat, Budiman. 2002. "Market environment and potential to sustain CGPRT Crops-based agricultural diversification," *Palawija News* 19 (1): 8-11.
31. Hutabarat, Budiman. 2002. "Economic significance of legumes, roots and tuber crops in Asia and the Pacific," *Palawija News* 19 (3): 1-10.
32. Hutabarat, Budiman, R. Kustiari, B. Rahmanto, H. Tarigan, and A. Askin. 2001. Analisis Dampak Investasi Publik terhadap Sektor Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Bogor.
33. Hutabarat, Budiman. 2001. "Investasi publik pada sektor pertanian di era otonomi," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 19 (2): 24-37.

34. Hutabarat, Budiman and Sumedi. 2001. "Analisis ordo integrasi beberapa peubah ekonomi," *Jurnal Agro Ekonomi* 19 (2): 1-16.
35. Hutabarat, Budiman. 2001. "Commodity export diversification and poverty reduction in South and Southeast Asia," *Palawija News* 18 (2): 16-18.
36. Hutabarat, Budiman. 2001. "Commercialization is a key to the development of CGPRT crops in Asia," *Palawija News* 18 (3): 7-11.
37. Hutabarat, Budiman and B. Rahmanto. 2001. "Analisis perdagangan ekspor dan impor cabai merah," *Dalam* I W. Rusastra, P.U. Hadi, A. R. Nurmanaf, E. Jamal, A. Syam (Eds.). *Prosiding Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 ke Depan. Volume II*: pp. 366-378. PSE, Bogor.
38. Hutabarat, Budiman, A. H. Malian, A. M. Djulin, T. B. Purwantini, and Sumedi. 2000. *Analisis Kebijaksanaan Moneter mendukung Sektor Pertanian Andalan. Laporan Hasil Penelitian*. PSE, Bogor.
39. Hutabarat, Budiman, Hardoko, B. Sayaka, and K. S. Indraningsih. 2000. *Analisis Daya Saing dan Prospek Pasar Ekspor Hasil Perikanan Andalan menunjang PROTEKAN 2003. Laporan Hasil Penelitian*. PSE, Bogor.
40. Hutabarat, Budiman, H. Mayrowani, B. Santoso, M. H. T. Kalo, B. Winarso, B. Rahmanto, C. Muslim, Waluyo, V. Darwis. 1999. *Sistem Komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah. Volume I. Hasil Umum dan Cabai Merah. Laporan Hasil Penelitian PSE, Bogor*.
41. Hutabarat, Budiman, H. Mayrowani, B. Winarso, C. Muslim, V. Darwis, B. Rahmanto, Waluyo, B. Santoso, and M. H. T. Kalo. 1999. *Sistem Komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah. Volume II. Bawang Merah. Laporan Hasil Penelitian*. PSE Bogor.

42. Riethmuller, P., J. Chai, D. Smith, Budiman Hutabarat, B. Sayaka, Y. Yusdja. 1999. "The mixing ratio in the Indonesian dairy industry," *Agricultural Economics* 20: 51-56.
43. Las, I., S. Purba, M. Mardiharini, S. Kartaatmadja, Budiman Hutabarat, A. M. Djulin, A. Djauhari, A. K. Makarim, K. Suradisastra, S. Rochayati. 1999. Prospek Pola IP Padi 300 untuk Mengantisipasi Anomali Iklim dan Krisis Pangan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Prospek Penanaman Padi sebagai Musim Ke-3 Mengantisipasi Anomali Iklim dan Krisis Pangan. Cisarua, Bogor, March 16-17, 1999. Mimeograph.
44. Hutabarat, Budiman. 1999. "Ekonomi produksi dan manajemen usahatani dalam percepatan adopsi teknologi, peningkatan produksi, dan kesempatan kerja: Rangkuman dan gagasan dalam penentuan arah penelitian di masa depan," *Dalam* I W. Rusastra, A. R. Nurmanaf, Budiman Hutabarat, Y. Yusdja, T. Pranadji, and K. Suradisastra (*Penyunting*). *Dinamika Inovasi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian*. Buku I (Volume I). PSE, Bogor. Pp. 270-293.
45. I W. Rusastra, A. R. Nurmanaf, Budiman Hutabarat, Y. Yusdja, T. Pranadji, and K. Suradisastra. 1999. *Dinamika Inovasi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian*. Buku I. PSE, Bogor.
46. Hutabarat, Budiman. 1998. "Some contemporary features of Indonesian dairy industry," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 16 (1): 1-8.
47. Agustian, A and Budiman Hutabarat. 1998. "Potensi dan peluang pemanfaatan sumber pertumbuhan produksi jagung dan kedelai di Sumatera Selatan," *Dalam* A. Suryana, I.W. Rusastra, M. Rachmat, A. Purwoto (*Penyunting*). *Prosiding Dinamika Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian*: 79-94. PSE, Bogor.

48. Sadikin, I., Budiman Hutabarat, and A. Djauhari. 1998. "Dampak deregulasi perdagangan terhadap pengembangan usahatani jagung di Bengkulu," *Dalam* A. Suryana, I.W. Rusastra, M. Rachmat, A. Purwoto (Eds.). *Prosiding Dinamika Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian*: 263-279. PSE, Bogor.
49. Hutabarat, Budiman, H. Mayrowani, B. Rahmanto, B. Winarso, M. Iqbal, H. Supriyadi, J. Situmorang, M.S.M. Tambunan, B. S. Abbas dan K. Suradisastra. 1998. *Potensi dan Peluang Pemanfaatan Sumber-sumber Pertumbuhan Produksi Pertanian Unggulan Kalimantan*. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Bogor.
50. Hutabarat, Budiman, D. Smith, and P. Riethmuller. 1998. "Problems and suggestions for improvement of Indonesian dairy for better efficiency," *Indonesian Agricultural Research and Development Journal* 20 (2): 40-49.
51. Hutabarat, Budiman. 1998. *Perubahan Sistem Pertanian Dilihat dari Analisis Ekonomi dan Pemasaran*. Paper presented at the Workshop to Access and Plan Implementation of Agricultural Development in Southern Area of Timor Timur. March 26-27, 1998. Dili. Mimeograph.
52. Suryana, A. and Budiman Hutabarat. 1998. *Dinamika Sektor Pertanian di Sumatera Utara: Potensi, Peluang dan Permasalahannya*. Makalah disampaikan pada Ekspose Hasil-hasil Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 23-25 Maret 1998. Medan. Mimeograph.
53. Suryana, A., Budiman Hutabarat, and S. H. Susilowati. 1997. *Penawaran dan Permintaan serta Peluang Pasar Komoditas Tanaman Industri dan Perkebunan*. Makalah disampaikan pada Pertemuan Komisi Penelitian Pertanian untuk Tanaman Perkebunan. 20-21 November 1997. Medan. Mimeograph.

54. Evenson, R. E., E. Abdurachman, Budiman Hutabarat, A. C. Tubagus. 1997. "Contribution of research on food and horticultural crops in Indonesia: An economic analysis," *Economics and Finance in Indonesia* 45 (4): 551-578.
55. Hutabarat, Budiman, A. Djauhari, A. Agustian, T. D. Permata, B. Rachman, I. Sadikin, J. Situmorang. 1997. Potensi dan Peluang Pemanfaatan Sumberdaya Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan di Luar Jawa. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Bogor.
56. Hutabarat, Budiman. 1997. Sektor pertanian dalam perspektif perubahan struktur ekonomi dan globalisasi pasar," *Dalam* T. Sudaryanto, T. Pranadji, A. Taryoto, I W. Rusastra (Eds). Prosiding Industrialisasi, Rekayasa Sosial dan Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian: 1-13. PSE, Bogor.
57. Hutabarat, Budiman, R. Hendayana, N. A. Kirom, I. S. Anugrah, G. S. Budhy, C. Muslim, V. Siagian, B. Santoso, M. Siregar. 1996. Prospek Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian di Wilayah Pertumbuhan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Bogor.
58. Hutabarat, Budiman. 1996. Analisis deret waktu kecenderungan nilai tukar petani di Jawa Tengah. *Prakarsa* 3 (2): 31-42.
59. Hutabarat, Budiman, P. Riethmuller, B. Sayaka, D. Smith, and Y. Yusdja. 1996. "Developments in the Indonesian dairy industry," *Agricultural Science New Series* 9 (6): 41-44.
60. Hutabarat, Budiman, Y. Yusdja, and B. Sayaka. 1996. "Menengok industri ternak sapi perah di Queensland, Australia: Susu sapi Australia, semakin kental," *Poultry Indonesia* 197 (Juli): 30-34.

61. Hutabarat, Budiman. 1996. "Pengukuran dampak nilai tukar terhadap produksi dan pendapatan petani padi," *Jurnal Agro Ekonomi* 15 (2): 21-35.
62. Sayaka, B. and Budiman Hutabarat. 1996. "Ragam sumber pendapatan petani padi sawah di Kalimantan Tengah: Studi kasus di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas," *Jurnal Agro Ekonomi* 15 (1): 41-47.
63. Hutabarat, Budiman, and B. Winarso. 1995. "Upaya diversifikasi ekspor pertanian di Sumatera Utara: Kasus pengembangan ternak babi," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 13 (1): 58-70.
64. Hutabarat, Budiman, R. Hendayana, C. Saleh, R. Kustiari, B. Sayaka, Waluyo, I. Sadikin, S. Mardiyanto, H. Tarigan. 1995. *Dinamika Nilai Tukar Petani dan Dampaknya terhadap Pelestarian Swasembada Beras dan Pangan Lainnya*. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Bogor.
65. Jamal E. and Budiman Hutabarat. 1995. "Identifikasi wilayah miskin di Propinsi Timor Timur: Kabupaten Aileu dan Ambeno," *Dalam* Hermanto, A. Pakpahan, M. Husen Sawit, A. Taryoto, A. Zulham, H. P. Saliem (Eds). *Prosiding Kemiskinan di Pedesaan: Masalah dan Alternatif Penanggulangannya*: 164-176. PSE, Bogor.
66. Hendayana R. and Budiman Hutabarat. 1995. "Identifikasi wilayah miskin di Propinsi Irian Jaya," *Dalam* Hermanto, A. Pakpahan, M. Husen Sawit, A. Taryoto, A. Zulham, H. P. Saliem (Eds). *Prosiding Kemiskinan di Pedesaan: Masalah dan Alternatif Penanggulangannya*: 278-291. PSE, Bogor.

67. Hutabarat, Budiman and Y. Yusdja. 1995. "Dominansi industri pakan dalam penentuan harga jagung: Suatu ciri pola kemitraan yang suboptimal," *Dalam* Hermanto, M. H. Sawit, A. Zulham, and Sunarsih (Eds). Volume 2. Prosiding Profil Kelembagaan Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian dan Prospek Pengembangan Agribisnis di Indonesia: 133-152. PSE, Bogor.
68. Hutabarat, Budiman and C. Muslim. 1995. "Tembakau virginia rakyat dalam konstelasi adu tawar pembeli di Nusa Tenggara Barat: Masalah pembangunan pertanian turunan kedua," *Dalam* Hermanto, M. H. Sawit, A. Zulham, and Sunarsih (Eds). Volume 2. Prosiding Profil Kelembagaan Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian dan Prospek Pengembangan Agribisnis di Indonesia: 214-236. PSE, Bogor.
69. Hutabarat, Budiman. 1995. "Analisis deret waktu kecenderungan nilai tukar petani di Indonesia," *Jurnal Agro Ekonomi* 14 (2): 55-65.
70. Hutabarat, Budiman and H. Tarigan. 1995. "Dinamika pangsa dan nilai tukar sektor pangan dan keterkaitannya dengan swasembada beras," *Dalam* A. H. Taryoto, A. Purwoto, and Sumaryanto (Eds). Prosiding Kelembagaan dan Prospek Pengembangan Beberapa Komoditas Pertanian: 92-105. PSE, Bogor.
71. Hutabarat, Budiman and Waluyo. 1994. "Cropping system of vegetables and its significance on labor use and revenues in Kabupaten Bandung, West Java,". *In* S. S. Harjadi, S. Tjitrosomo, W. Harjadi, W. D. Widodo, and Sudarsono (Eds.). *Acta Horticulturae* Number 369 (September 1994): 26-38. International Society for Horticultural Science: Symposium on Small Scale Vegetable Production and Horticultural Economics in Developing Countries. Bogor, Indonesia, June 23 26, 1992.

72. Hutabarat, Budiman and B. Winarso. 1994. "Impact of market diversification on horticulture farm development in Tanah Karo, North Sumatera,". In S. S. Harjadi, S. Tjitrosomo, W. Harjadi, W. D. Widodo, and Sudarsono (Eds.). *Acta Horticulturae* Number 369 (September 1994): 244-260. International Society for Horticultural Science: Symposium on Small Scale Vegetable Production and Horticultural Economics in Developing Countries. Bogor, Indonesia, June 23-26, 1992.
73. Hutabarat, Budiman. 1994. *Agrarian Structure and Reform Measures. Country Papers: Indonesia (2). Report of an APO Study Meeting. Seoul, The Republic of Korea. August 2-7, 1993. Asian Productivity Organization. Tokyo.*
74. Evenson, R. E., E. Abdurachman, Budiman Hutabarat. 1994. *An Economic Impacts Assessment of the Agency for Agricultural Research and Development (AARD, Ministry of Agriculture, Government of Indonesia) Research Programs in Vegetables, Estate Crops, Fruits, Livestock and Fisheries. Manuscript.*
75. Hutabarat, Budiman and B. Winarso. 1994. "Analisis biaya sumberdaya dalam negeri dan kepekaannya pada usaha ternak babi di Sumatera Utara,". *Jurnal Agro Ekonomi* 13 (1): 61-75.
76. Andriati, Budiman Hutabarat, and J. Situmorang. 1994. "Keragaan usahatani coklat rakyat: Studi kasus di Provinsi Sulawesi Tenggara," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 12 (1) 61-69.
77. Winarso, B. and Budiman Hutabarat. 1994. "Profil pengusahaan ternak babi di Sumatera Utara," *Dalam* B. Bakrie, B. Haryanto, E. Wina, I P. Komiang, K. Dwiyanto (Eds). *Prosiding Seminar Nasional dalam Ilmu dan Teknologi Peternakan. 25-26 Januari 1994, Ciawi, Bogor, Indonesia. Volume 2: 677-687.*

78. R. R. Piggott, K. A. Parton, E. M. Treadgold, and Budiman Hutabarat. 1993. Food Price Policy in Indonesia. ACIAR Monograph No. 22. ACIAR. Canberra. Australia.
79. Hutabarat, Budiman, Y. Yusdja, E. Basuno, A. Subekti, I. Sadikin, V. Siagian. 1993. Pola Perdagangan Wilayah Komoditas Jagung di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Bogor.
80. Zulham, A., N. Syafaat, Y. Marisa, Budiman Hutabarat, and T. B. Purwantini. 1993. Pola Perdagangan Wilayah Komoditas Kedele di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Bogor.
81. Santoso, B., Budiman Hutabarat, R. Hendayana, M. Iqbal, M. Gunawan, A. S. Hadimuslihat, C. Muslim. 1993. Pola Perdagangan Wilayah Komoditas Tembakau di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Bogor.
82. Hutabarat, Budiman, R. Hendayana, B. Winarso, and B. Santoso. 1993. Keunggulan Kompetitif Komoditas Ekspor: Kasus Kopi di Jawa Timur dan Babi di Sumatera Utara. CASER Monograph Series No. 11. PSE, Bogor.
83. Hutabarat, Budiman, E. Jamal, S. Siregar, H. Supadmo, Bachtiar, and Syaiful Bahri. 1993. Identifikasi Wilayah Miskin dan Alternatif Upaya Penanggulangannya di Propinsi Timor Timur. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Bogor.
84. Hutabarat, Budiman, R. Hendayana, D. Sahari, F. Rasyid, and O. Suherman. 1993. Identifikasi Wilayah Miskin dan Alternatif Upaya Penanggulangannya di Propinsi Laporan Hasil Penelitian. Irian Jaya. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Bogor.

85. Hutabarat, Budiman. 1993. "Kesepakatan internasional dan kebijakan beberapa negara mitra dagang Indonesia, serta dampaknya terhadap sektor pertanian Indonesia," *Dalam* T. Sudaryanto, E. Pasandaran, A. Djauhari (Eds). *Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia*. Prosiding PSE, Bogor.
86. Sudaryanto, T. and Budiman Hutabarat. 1993. "Perkembangan harga komoditas pertanian di pasar dunia dan implikasinya bagi Indonesia," *Dalam* T. Sudaryanto, E. Pasandaran, A. Djauhari (Eds). *Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia*. Prosiding PSE, Bogor.
87. Hutabarat, Budiman, I. Sadikin, and B. Winarso. 1993. "Karakteristik dan perspektif agribisnis kentang di Tanah Karo, Sumatera Utara," *Dalam* T. Sudaryanto, E. Pasandaran, A. Djauhari (Eds). *Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia*. Prosiding PSE, Bogor.
88. Hutabarat, Budiman and Waluyo. 1993. "Produksi dan pemasaran kubis sebagai bagian dari rantai agribisnis di Bandung District, Jawa Barat," *Dalam* T. Sudaryanto, E. Pasandaran, A. Djauhari (Eds). *Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia*. Prosiding PSE, Bogor.
89. Hendayana, R., Budiman Hutabarat, and B. Santoso. 1993. "Analisis keunggulan komparatif komoditas kopi," *Jurnal Agro Ekonomi* 12 (1): 9-28.
90. Hutabarat, Budiman, T. Pranadji, and A. Nasution. 1993. "Dimensi perdagangan kelapa dan kopra rakyat di Sulawesi Utara," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 11 (2): 24-36.
91. Hutabarat, Budiman. 1993. "Analisis pasar komoditas hortikultura sayuran Tanah Karo: Kasus kentang dan bawang daun," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 11 (2): 37-46.

92. Roche, F., Budiman Hutabarat, A. Bakar, N. Daris, Toni S.W., and B. Adinugroho. 1992. "Regional costs and comparative advantage in secondary crops: corn, soybeans, and cassava," *Indonesian Food Journal* 6 (3): 74-117.
93. Hutabarat, Budiman, R. Hendayana, and B. Santoso. 1992. "Keunggulan kompetitif dan proteksi efektif komoditas kopi Jawa Timur,". *Dalam* Budiman Hutabarat, B. Santoso, S. Bachri, B. Winarso, and R. Hendayana (Eds). *Keunggulan Kompetitif Komoditas Perkebunan dan Peternakan*. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Bogor.
94. Hutabarat, Budiman and B. Winarso. 1992. "Keunggulan kompetitif ternak babi sebagai komoditas ekspor Sumatera Utara,". *Dalam* B. Hutabarat, B. Santoso, S. Bachri, B. Winarso, and R. Hendayana (Eds). *Keunggulan Kompetitif Komoditas Perkebunan dan Peternakan*. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Bogor.
95. Roche, F., Budiman Hutabarat, A. Bakar, N. Daris, Toni S.W., and B. Adinugroho. 1992. "Regional Costs and Comparative Advantage in Secondary Crops, Indonesia,". Part III. In P. Jierwiryapant, Hermanto, F. Roche, and J. W. T. Bottema (Eds). *Local Soybean Economies and Government Policies in Thailand and Indonesia*. CGPRT Center. Bogor.
96. Hutabarat, Budiman, T. Pranadji, and A. Nasution. 1992. "Pengaruh luas kebun dan pendapatan usahatani kelapa dalam pengolahan pasca panen kelapa di tingkat petani," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 9 (2) & 10 (1): 78-85.
97. Manurung, V.T., Budiman Hutabarat, Supriyati, and S.H. Susilowati. 1992. "Ketersediaan dan profitabilitas pengusaha traktor di Jawa Barat, Sumatera Utara, and Lampung," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 9 (2) & 10 (1): 21-29.

98. Hutabarat, Budiman. 1991. "Implication of economic specification on economic elasticity estimates: A case of Generalized Leontief Profit Function," *Jurnal Agro Ekonomi* 10 (1 & 2): 48-55.
99. Irawan, B. and Budiman Hutabarat. 1991. "Analisis efisiensi penggunaan masukan dan ekonomi skala usaha pada usahatani tebu di Jawa Timur," *Jurnal Agro Ekonomi* 10 (1 & 2): 73-90.
100. Hutabarat, Budiman, Waluyo, B. Winarso, B. Sayaka, I. Sadikin. 1991. Pola Usaha Pertanian Hortikultura di Jawa Barat and Sumatera Utara. Laporan Hasil Penelitian. PAE, Bogor.
101. Hutabarat, Budiman, A. Djauhari, S. M. Pasaribu, dan T. Pranadji. 1990. "Determinan pengeringan padi oleh petani di Jawa Barat dan Jawa Timur," *Jurnal Agro Ekonomi* 9 (1): 41-56.
102. Hutabarat, Budiman, M. Rachmat, S.H. Susilowati, T. Pranadji, Supriati, Wirawan, V. T. Manurung. 1990. Kebijakan Agribisnis Pengolahan Agro Industri dan Mekanisasi Pertanian: Keterkaitan Antara Kegiatan Mekanisasi Pertanian dengan Sektor Pertanian dan Perekonomian Pedesaan. Laporan Hasil Penelitian. PAE, Bogor.
103. Hutabarat, Budiman, Y. Yusdja, and Y. Saefudin. 1990. "Ekonomi unggas dan prospeknya untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor," *Dalam* A. Suryana, F. Kasryno, and E. Pasandaran (Eds.) *Kontribusi Sektor Pertanian dalam Peningkatan Ekspor Non Migas*. PAE, Bogor.

104. Hutabarat, Budiman, T. Pranadji dan A. Nasution. 1989. Perlakuan Pasca Panen dan Pemasaran Kelapa. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian. Bogor.
105. Hutabarat, Budiman. 1989. "Endogenizing farmer's rice variety selection on input demand model: A cost minimization approach to induced innovation hypothesis," *Masyarakat Indonesia* 16 (1): 39-60.
106. Hutabarat, Budiman. 1989. Issues and strategies for developing Indonesian horticultural subsector. *Indonesian Agricultural Research and Development Journal* 11 (1 & 2): 5-13.
107. Hutabarat, Budiman and E. Koswara. 1989. Keamanan Pangan dan Perbandingan Harga Komoditas Pangan Sebagai Landasan Kebijaksanaan Harga. Makalah disampaikan pada Kursus PWI. Cabang Malang. November 25, 1989. Malang.
108. Hutabarat, Budiman, F. Kasryno, and S. Hadiwigeno. 1988. Present Status and Potential of Indonesian Horticultural Crops. A paper presented at the IFPRI's Workshop on Production, Marketing, and Export Trade of Horticultural Products in Indonesia, the Philippines, and Thailand. October 12-14, 1988. Bangkok, Thailand.
109. Rivai, R. S., M. Rachmat, Budiman Hutabarat, Andriati, Wirawan, and N. Syafaat. 1988. Kebijakan Diversifikasi Pertanian dan Penentuan Biaya Air dalam Rangka Pembangunan Regional Jawa Timur. Laporan Hasil Penelitian. PAE, Bogor.

110. Pasandaran, E., Budiman Hutabarat, and S. Djunaedi. 1988. Irrigation Management to Support Crop Diversification in Indonesia. A paper presented at the IIMI's Workshop on Irrigation Management for Diversified Cropping in Rice Based Systems in Asia. November 30-December 3, 1988. Bangkok, Thailand.
111. Rachmat, M., Budiman Hutabarat, Wirawan, R. S. Rivai, T. Pranadji, R. N. Suhaeti. 1988. Pengelolaan Irigasi dan Diversifikasi Pertanian di Lampung. Laporan Penelitian. Proyek Penelitian Kerjasama antara Rencana Pengembangan Sumberdaya Air, Departemen Pekerjaan Umum dan PAE, Bogor.
112. Hutabarat, Budiman. 1988. "Ekonomi produksi padi di Indonesia," *Dalam* F. Kasryno, A. Suryana, A. Djauhari, P. Simatupang, B. Hutabarat, C. A. Rasahan (Eds). Perubahan Struktur Ekonomi Pedesaan. Prosiding Panel Petani Nasional. PAE, Bogor.
113. Hutabarat, Budiman. 1988. "Analisis elastisitas produksi terhadap masukan pada usahatani padi di Sulawesi Selatan," *Dalam* F. Kasryno, A. Suryana, A. Djauhari, P. Simatupang, B. Hutabarat, C. A. Rasahan (Eds). Perubahan Struktur Ekonomi Pedesaan. Prosiding Panel Petani Nasional. PAE, Bogor.
114. Hutabarat, Budiman. 1988. "Analisis keterpaduan pasar gula pasir di Jawa," *Jurnal Agro Ekonomi* 7 (2): 1-11.

115. Hutabarat, Budiman. 1988. "Suatu alternatif pendugaan produktivitas masukan dari data usahatani di Sulawesi Selatan," *Dalam* F. Kasryno, A. Suryana, A. Djauhari, P. Simatupang, B. Hutabarat, C. A. Rasahan (Eds). *Perubahan Struktur Ekonomi Pedesaan. Prosiding Panel Petani Nasional. PAE, Bogor.*
116. Marisa, Y. and Budiman Hutabarat. 1988. "Analisis usahatani padi di Sulawesi Selatan," *Dalam* F. Kasryno, A. Suryana, A. Djauhari, P. Simatupang, B. Hutabarat, C. A. Rasahan (Eds). *Perubahan Struktur Ekonomi Pedesaan. Prosiding Panel Petani Nasional. PAE, Bogor.*
117. Marisa, Y. and Budiman Hutabarat. 1988. "Ragam sumber pendapatan rumah tangga di pedesaan Sulawesi Selatan," *Dalam* F. Kasryno, A. Suryana, A. Djauhari, P. Simatupang, B. Hutabarat, C. A. Rasahan (Eds). *Perubahan Struktur Ekonomi Pedesaan. Prosiding Panel Petani Nasional. PAE, Bogor.*
118. Rachmat, M. and Budiman Hutabarat. 1988. "Tingkat penerapan diversifikasi usahatani dan pengaruhnya terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 6 (2): 23-32.
119. Pranadji, T. and Budiman Hutabarat. 1988. "Beberapa aspek sosial ekonomi kegiatan pengeringan padi," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 6 (2) : 53-60.
120. Hutabarat, Budiman. 1987. "Rice farmer's risk attitude: An analysis of production risk in Jawa Barat," *Jurnal Agro Ekonomi* 6 (1 & 2): 51-66.
121. Hutabarat, Budiman and E. Pasandaran 1987. "Diversifikasi pangan: Analisis masalah dan strategi pengembangan," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 6 (1): 14-17.

122. Hutabarat, Budiman. 1987. Overview of Indonesian Food Price Policy Research (Draft 3). Working Paper 5. CAER UNE Collaborative Research. Bogor, Indonesia.
123. Hutabarat, Budiman. 1987. Description of Food Crops Policies in Indonesia (Draft 1). Working Paper 6. CAER UNE Collaborative Research. Bogor, Indonesia.
124. Hutabarat, Budiman, Y. Saefudin, H. Nataatmadja, K. Adisasmito, Syamsir, C. A. Rasahan, F. Kasryno. 1987. "Strategies for Developing the Sugar Industry in Indonesia: Resources Utilization and Technology Transfer," In J. L. Clayton and H. Handojo (Eds). International Society of Sugar Cane Technologists. Proceedings XIX Congress. Jakarta, Indonesia.
125. Hutabarat, Budiman, T. Pranadji, E. M. Lokollo, A. Djauhari, S. M. Pasaribu, Y. Marisa, Waluyo. 1987. Peranan Lembaga Pemasaran dalam Penanganan Pasca Panen Padi. Laporan Hasil Penelitian. PAE, Bogor.
126. Hutabarat, Budiman. 1986. A study of farm level input demands without seed selectivity adjustment on rice farms in the Cimanuk River Basin, Jawa Barat," *Jurnal Agro Ekonomi* 5 (2) : 15-26.
127. Hutabarat, Budiman and E. Pasandaran. 1986. Reorientation of Indonesian Irrigation Management: Utilization toward Crop Diversification. A country paper presented at the IIMI's Workshop Irrigation Management for Diversified Cropping. November 24-27, 1986. Digana Village via Kandy, Sri Lanka.
128. Hutabarat, Budiman. 1984. "Dampak insus terhadap peningkatan kesejahteraan petani," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 3 (2): 1-12.

129. Hutabarat, Budiman. *Dari Data Agronomi Menjadi Rekomendasi Bagi Petani*, 1979. PAE, Badan Litbang CAER, Bogor, Indonesia. Translation of *From Agronomic Data to Farmer Recommendation*. CIMMYT's Publication.

DAFTAR SEBAGAI PEMBICARA/ KEYNOTE SPEAKER

- 2007;(24-26 Juli); Pembicara pada acara “Sosialisasi Tarif Perdagangan Internasional” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura di Anyer, Banten.
- 2007;(13-14 Juni); Pembicara pada Seminar Nasional Jeruk 2007 dengan tema “Memanfaatkan Dukungan Inovasi Teknologi dan Membangun Sinergi antar Pelaku Agribisnis dalam Meningkatkan Daya saing Produk Jeruk Nasional”, di Yogyakarta.
- 2007;(23-27 April); Pembicara pada pelatihan “International Agricultural Trade Policy” yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian di Ciawi, Bogor.
- 2006;(12-13 Desember); Pembicara pada “Pertemuan Perumusan Kebijakan Pemasaran Antar Wilayah” di Surabaya, Jawa Timur.
- 2006;(7-8 Desember); Pembicara pada “Pertemuan Perumusan Kebijakan Pemasaran Antar Wilayah” di Jakarta Selatan, Jakarta.
- 2006;(16 Juni 16-1 Juli); Pembicara pada “Training on International Trade and WTO for Indonesia” funded by Korea International Cooperation Agency (KOICA), Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management, Seoul, Korea.

- 2004; (September 14-15); Pembicara pada the Regional Workshop on Prospects of Feed Crops in South East Asia: Alternative to Alleviate Poverty through Secondary Crops Development, Bogor, Indonesia.
- 2002; (September 3-4); Pembicara pada the Regional Workshop on the CGPRT Crops Supply/Demand and Potential/Constraints for Their Expansion in South Asia, Bogor, Indonesia.
- 2001; (19-20 Juli); Pembicara pada the Agricultural Trade Liberalization: Developing Countries' Interests and Concerns in Relation to Agricultural Liberalization under the WTO, Jakarta.
- 1998; (26-27 Maret); Pembicara pada the Workshop to Assess and Plan Implementation of Agricultural Development in Southern Area of Timor Timur. Dili.
- 1998; (23-25 Maret); Pembicara pada the Agricultural Technology Research and Assessment Results Public Expose. Medan.
- 1997; (20-21 November); Pembicara pada the Meeting of Agricultural Research Commission on Estate Crops. Medan.
- 1996; (17-18 Januari); Pembicara pada Seminar Nasional "Industrialisasi Rekayasa Sosial dan Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian," Cisarua. Bogor.
- 1989; (25 November); Pembicara Kursus PWI Cabang Malang. Malang.
- 1988; (30 November-3 Desember); Pembicara pada the IIMI Workshop on Irrigation Management for Diversified Cropping in Rice Based Systems in Asia. Bangkok, Thailand.

- 1988; (8 Oktober); Pembicara pada the Seminar on Increasing Exports of Indonesian Horticultural Commodities. Bogor, Indonesia.
- 1987; (30-31 Januari); Pembicara pada the Second National Agro-industry Symposium. Bogor, Indonesia.
- 1986; (24-27 November); Pembicara pada the Workshop on Irrigation Management for Diversified Cropping. Digana Village via Kandy, Sri Lanka.

DAFTAR SEBAGAI EDITOR JURNAL /PROSIDING

- 2003-Sekarang, Ketua Dewan Redaksi Jurnal Agro Ekonomi (JAE) PSE-KP.
- 2002-Sekarang, Anggota Dewan Redaksi *Indonesian Journal of Agricultural Science (IJAS)*, IAARD.
2005. Lokollo, E. M. and Budiman Hutabarat. (Eds). Prospects of Feed Crops in Southeast Asia: Alternative to Alleviate Poverty through Secondary Crops' Development. Proceedings of the Regional Workshop. Bogor, Indonesia, September 14-15, 2004. CAPSA Monograph No. 47.
2003. Hutabarat, Budiman. The CGPRT Feed Crops Supply/Demand and Potential/Constraints for Their Expansion in South Asia. Proceedings of a Workshop Held in Bogor, September 3-4, 2002. UN ESCAP CGPRT Centre. Bogor.
- 1998-2001, Anggota Dewan Redaksi *Indonesian Agricultural Research and Development Journal (IARDJ)*, AARD.

1999. I W. Rusastra, A. R. Nurmanaf, Budiman Hutabarat, Y. YUSDJA, T. Pranadji, and K. Suradi-sastra (Penyunting). *Dinamika Inovasi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian*. Buku I (Volume I). PSE, Badan Litbang, Deptan. Bogor.
1992. Budiman Hutabarat, B. Santoso, S. Bachri, B. Winarso, and R. Hendayana (Eds). *Keunggulan Kompetitif Komoditas Perkebunan dan Peternakan*. Laporan Hasil Penelitian. PSE, Badan Litbang. Bogor.
- 1987-1990 menjabat sebagai Ketua Dewan Redaksi Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE), PAE.
1988. F. Kasryno, A. Suryana, A. Djauhari, P. Simatupang, Budiman Hutabarat, C. A. Rasahan (Eds). *Perubahan Struktur Ekonomi Pedesaan*. Prosiding Panel Petani Nasional. PAE, Badan Litbang. Bogor.

DAFTAR KEGIATAN LAIN/ORGANISASI PROFESI

- 2004-sekarang. Anggota Tim Teknis-Tim Nasional Perunding Perdagangan Internasional/TIMNAS PPI Bidang Pertanian dan SATGAS G-33.
- 1998-1999. Anggota Tim Monitoring dan Evaluation Studi Super-imposed Penerapan Pola Intensitas Pertanaman (IP) Padi 300.
- 1998-1999. Anggota Tim Analisis Dampak Pola Intensitas Pertanaman (IP) Padi 300 and Pengembangan Sistem Usaha Pertanian (SUP) Padi.
- 1998-2000. Anggota Tim Asistensi ke BPTP di berbagai provinsi tahun 1998-2000.

- 1981-1998. Anggota the American Agricultural Economics Association.
- 1985-1998. Anggota Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia/ PERHEPI.
- 1988-1993. Wakil Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia/ PERHEPI, cabang Bogor.
1989. Anggota Tim Koordinasi Penelitian Pasca-panen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 1989.
1988. Anggota Tim *AARD Master Research Plan*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAN PENDIDIKAN



Anak ke-lima dari delapan bersaudara, HUTABARAT BUDIMAN FRANCHEN dilahirkan pada tanggal 16 Desember 1950 di Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dari Ibu T.Tampubolon (Almh) dan Bapak J.W. Hutabarat (Alm.). Pada tahun 1990 menikah dengan Hotnida C.H.Siregar dan oleh Tuhan YME dikaruniai seorang putri, Tamaria Jesika dan seorang putra, Jogi Wiliam.

Pendidikan Sekolah Rakyat dan Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama diselesaikannya berturut-turut pada tahun 1963 dan 1966 di desa lumbung padi yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit dengan kegiatan ekonomi sekitar desa waktu itu sangat bergairah, yakni Desa Hutabayuraja, Kec.Tanah Jawa, P. Siantar, Kab. Simalungun. Pada sekitar bulan Desember 1966 berangkat dari desa kecil ini menuju Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Umum tingkat Atas di Djatinegara, Jakarta Timur dan selesai tahun 1969. Berikutnya mendaftarkan diri ke Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada Januari tahun 1970. Mengikuti sistem pendidikan yang berlaku waktu itu, dua tahun kemudian lulus dari Tingkat Persiapan dan dua tahun berikutnya lulus Tingkat Sarjana Muda, disusul kemudian Tingkat Sarjana di bulan Agustus tahun 1977.

Selepas dari perguruan tinggi, menjadi tenaga honorer di Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sampai ditetapkan sebagai Calon Pegawai negeri pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Agro Ekonomi/PAE, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian pada bulan Mei

1979. Berkat dorongan dan kepercayaan Bapak Dr Sjarifuddin Baharsjah, Kepala PAE waktu itu pada bulan September 1979, ia diizinkan melanjutkan pendidikan lanjutan sampai tingkat Ph.D. di *Department of Economics, Iowa State University, Ames, Iowa, AS* dan selesai pada Desember 1985.

Perjalanan golongan sebagai pegawai negeri sipil dimulai pada bulan April 1983 ketika diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (III/a), lalu berturut-turut pada bulan Juli 1984 mendapatkan golongan III/b; November 1988, III/c; Agustus 1992, III/d; November 1994, IV/a; April 1997, IV/b; April 1999, IV/c; April 2001, IV/d; dan Oktober 2005, IV/e.

Setelah menyelesaikan pendidikan di AS, langsung kembali ke PAE dan mulai aktif melakukan penelitian sosial ekonomi pertanian sampai kini yang menghantarkannya mendapatkan jabatan-jabatan fungsional di Departemen Pertanian berturut-turut: Peneliti Muda bidang Sosial Ekonomi Pertanian pada Januari 1992, Ahli Peneliti Muda pada bulan Mei 1995, Ahli Peneliti Madya pada bulan Mei 1998 dan Ahli Peneliti Utama pada bulan November 2003.

Sambil berkiprah di bidang penelitian, pernah menjabat Ketua Kelti Perdagangan di PSE antara tahun 1988 sampai dengan 1995 dan pada tahun 2002 sampai sekarang adalah anggota Kelti Perdagangan Internasional dan Ekonomi Makro PSE-KP. Dalam mengamalkan ilmunya pernah ditugaskan Kepala Pusat PSE sebagai *co-team leader* atau ketua tim dalam penelitian-penelitian kerjasama dengan *the Department of Agricultural Economics and Business Management, the University of New England, Armidale, Australia*; *CAER MADECOR Research Project*; *PAE-P3GI (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia)*; *CASER, AARD, Indonesia-Department of Economics, University of Queensland, Australia*; dan *BAPPENAS*,

Jakarta Iowa State University, Ames, Iowa, USA. Kemudian pada masa antara November 2000-Januari 2003 menjadi Pemimpin Program Penelitian dan Pengembangan dan Ketua Tim Penelitian pada *the UN ESCAP CGPRT (Coarse Grains, Pulses, Roots and Tuber Crops) Centre*, Bogor, Indonesia.

Selain melakukan tugas-tugas penelitian, pernah menjadi Anggota Tim *AARD Master Research Plan* tahun 1988; Anggota Tim Koordinasi Penelitian Pasca-panen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 1989; Anggota Tim Monitoring dan Evaluation Studi Super-imposed Penerapan Pola Intensitas Pertanaman (IP) Padi 300 tahun 1998-1999; Anggota Tim Analisis Dampak Pola Intensitas Pertanaman (IP) Padi 300 and Pengembangan Sistem Usaha Pertanian (SUP) Padi tahun 1998-1999; dan Anggota Tim Asistensi ke BPTP di berbagai provinsi tahun 1998-2000.

Di bidang pembinaan keprofesionalan peneliti; pada masa 1987-1990 menjabat sebagai Ketua Dewan Redaksi Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE), PAE; 1998-2001, Anggota Dewan Redaksi *Indonesian Agricultural Research and Development Journal (IARDJ)*, AARD; 2002-Sekarang, Anggota Dewan Redaksi *Indonesian Journal of Agricultural Science (IJAS)*, IAARD; dan 2003-Sekarang, Ketua Dewan Redaksi Jurnal Agro Ekonomi (JAE) PSE-KP.

Untuk mendapat pencerahan dalam perkembangan isu dan pendekatan analisis yang berkembang akhir-akhir ini beberapa kali diberi kepercayaan mengikuti bengkel kerja, pelatihan atau pertukaran pengalaman di berbagai tempat pada tahun: 1987, sebagai peserta *the IRRI Grain Quality Workshop*, Los Banos, the Philippines; 1994, *Visiting Fellow at Economic Growth Center, Yale University*, New

Haven, Connecticut, U.S.A.; 2004, peserta *Part I and Part II: Web-based Modules and On-site Training of Twelfth Annual Short Course in Global Trade Analysis*, Purdue University, West Lafayette, Indiana, U.S.A.; 2004, peserta *Training on Strengthening Agricultural Policies*, Wageningen University Research, Wageningen, the Netherlands; 2005, peserta *Master Class in CGE Modelling*, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand; 2006, peserta dan pembicara pelatihan *International Trade and WTO for Indonesia*, Korea International Cooperation Agency (KOICA), Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management, Seoul, Korea.

Untuk mengamalkan pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian dan pelatihan beberapa pendekatan yang terkini di bidang penelitian pertanian tersebut, sejak tahun 2004 sampai sekarang menjadi anggota Tim Teknis-Tim Nasional Perunding Perdagangan Internasional/TIMNAS PPI Bidang Pertanian dan SATGAS G-33.

